

**PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI**

**PEMBERONTAKAN DI/TII ACEH 1953-1959**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan  
Program Studi Pendidikan Sejarah



oleh

NIS IKA HERWATI

NIM : 021314029

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH  
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA**

**2007**

**SKRIPSI**  
**PEMBERONTAKAN DI/TII ACEH 1953-1959**


Oleh

Nis Ika Herwati

NIM : 021314029

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I

  
Prof. Dr. P. J. Suwarno, S.H.

Tanggal 16 Januari 2007

Pembimbing II

  
Drs. B. Musidi, M. Pd.

Tanggal 16 Januari 2007

SKRIPSI

PEMBERONTAKAN DI/TII ACEH 1953-1959

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Nis Ika Herwati  
NIM: 021314029

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji  
Pada tanggal 10 Februari 2007  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Nama Lengkap

Tanda Tangan

Ketua Drs. Sutarjo Adisusilo, J.R., S.Th.

Sekretaris Drs. B. Musidi, M.Pd.

Anggota Prof. Dr. P.J. Suwarno, S.H.

Anggota Drs. B. Musidi, M. Pd.

Anggota Drs. A.K. Wiharyanto, M.M.

Yogyakarta, 10 Februari 2007  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Sanata Dharma  
Dekan,



Drs. Tarsisius Sarkim M.Ed., Ph.D

**HALAMAN MOTTO**

“ Suatu hari dalam tahun-tahun yang akan datang, kamu akan bergulat dengan dengan godaan besar atau gemetar di bawah penderitaan besar kehidupanmu, akan tetapi perjuangan sesungguhnya adalah disini, sekarang...”( stephen R. C.)

“ Tak ada kemenangan bersama kedurhakaan. Tak ada pujian bersama kesombongan. Tak ada kesehatan bersama kerakusan. Tak ada kemuliaan bersama adat yang bejat. Tak ada kesentosaan bersama kedengkian. Tak ada kemuliaan yang melebihi ketakwaan, musuh terbesar itu ialah yang paling tersembunyi tipu dayanya. Hikmah adalah milik orang beriman yang hilang. Yang jijik itu menghimpun segala aib yang buruk. Nasihat ditengah khalayak ramai itu adalah satu celaan...” ( Ali Bin Abi Thalib )

“Takut gagal adalah gagal sejati. Takut mati adalah sebelum mati. Hidup itu adalah gerak dan gerak itu adalah maju, berjuang dan naik, jatuh dan naik lagi...”  
“( Hamka)

“ Tidak ada orang yang sempurna, maka tidak perlu merasa lebih dari orang lain, jadi diri sendiri, berusaha dan tetap berdoa untuk menjadi lebih baik, karena Tuhan tidak akan pernah membantu orang tidak berusaha...”( Any)

## PERSEMBAHAN

- Dengan segala rasa syukur penulis persembahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
- Bapak tersayang, Ibu dan Mamak yang telah memberikan semangat dan perhatian yang tak pernah habis kepada penulis.
- Adikku Rino, Achmad dan Andi yang selalu menjadi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini
  - Mas Abdullah yang selalu ada dan dengan sabar memberikan semangat, dorongan serta kasih sayang.
- Sahabat-sahabatku Ruli, Eli, Inong, Idang, Njoo, Tyas, Weni, Sigit, Widi, Odhy dan Mas Sidik serta teman teman Pendidikan Sejarah angkatan 2002 yang telah banyak turut membantu, terima kasih atas kebersamaannya

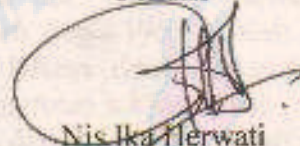
# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## KEASLIAN KARYA

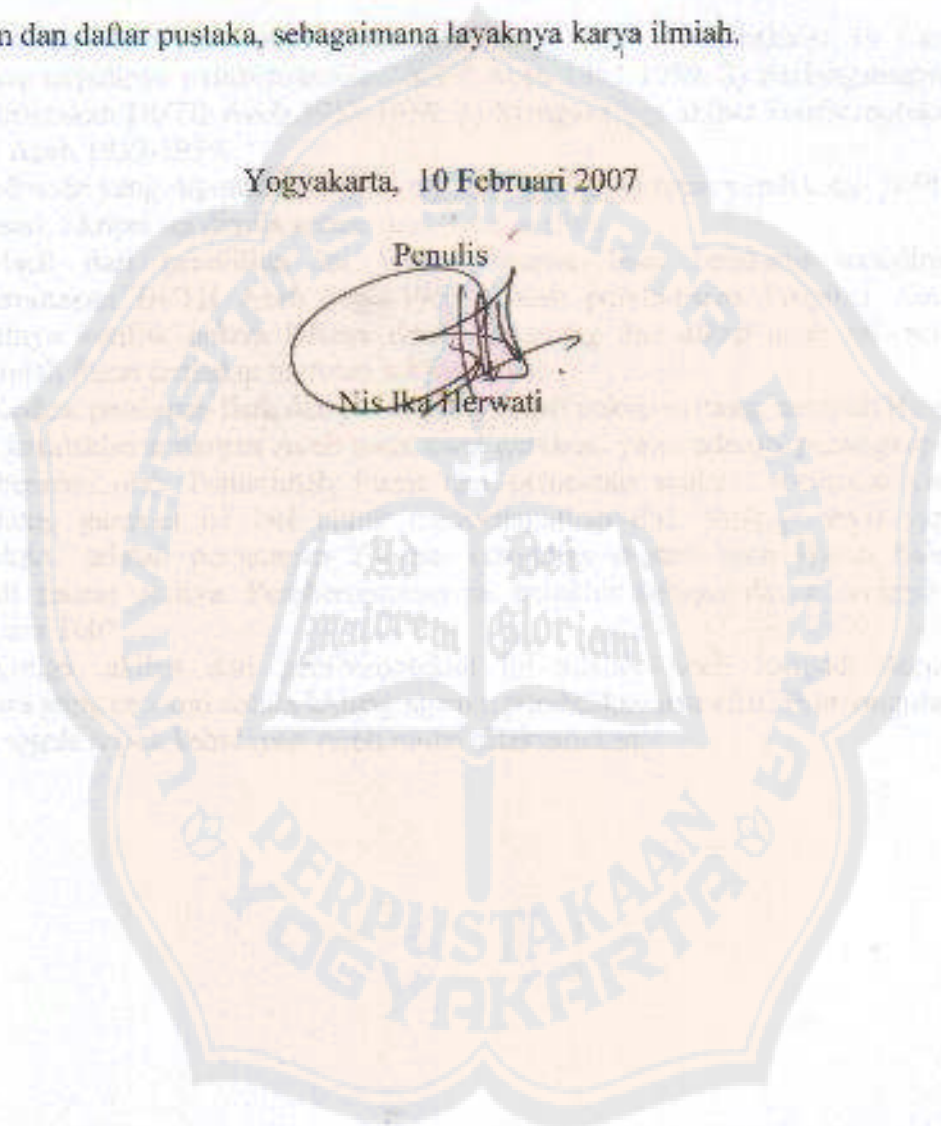
Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 10 Februari 2007

Penulis



Nis Ika Herwati



**ABSTRAK**

**PEMBERONTAKAN DI/TII ACEH 1953 - 1959**

**Oleh : Nis Ika Herwati**

**NIM : 021314029**

Tujuan skripsi ini adalah mendiskripsikan dan menganalisis: 1) Latar belakang terjadinya pemberontakan DI/TII Aceh 1953-1959, 2) Berlangsungnya Pemberontakan DI/TII Aceh 1953-1959, 3) Menganalisis akibat Pemberontakan DI/TII Aceh 1953-1959.

Metode yang digunakan adalah metode sejarah, dengan pendekatan politik dan sosial. Skripsi ini ditulis secara deskriptif analitis.

Hasil dari penelitian ini yang pertama, latar belakang terjadinya Pemberontakan DI/TII Aceh 1953-1959 adalah pembubaran Propinsi Aceh, munculnya konflik antara Ulama dan Uleebalang dan sikap acuh tak acuh Pemerintah Pusat terhadap tuntutan rakyat Aceh,

Kedua, persiapan fisik dan psikis yang sudah cukup matang, menjadi lemah akibat ketidakberuntungan Aceh pada awal gerakan, yaitu adanya penangkapan besar-besaran oleh Pemerintah Pusat dan pelucutan senjata, membuat para pendukung gerakan ini lari untuk menyelamatkan diri. Strategi awal yang digunakan adalah pertahanan Tangse, kemudian diganti oleh Hasan Saleh menjadi sistem gerilya. Pemberontakan ini berakhir dengan damai melalui “Ikrar Lam Teh”.

Ketiga, akibat dari pemberontakan ini adalah Aceh menjadi daerah istimewa yang otonom dalam bidang agama, pendidikan dan adat. Pembangunan dalam segala aspek kehidupan Aceh mulai dilaksanakan.

**ABSTRACT**

**THE REBELLION OF DI/TII ACEH IN 1953 - 1959**

**Author : Nis Ika Herwati**  
**Student Number : 021314029**

The purpose of this thesis were to describe and analyze 1) The background of DI/TII Aceh rebellion in 1953 – 1959, 2) The occurrence of DI/TII Aceh rebellion in 1953 – 1959, 3) To analyze the effects from the DI/TII Aceh rebellion in 1953 – 1959.

The method of this research was historical method with political and social approach. This thesis was composed using analytical descriptive.

The outcomes of the research were : first, the background of DI/TII Aceh rebellion in 1953 – 1959 was the dismissal of Aceh province, the occurrence of conflict between spiritual leaders (Ulama) and *Uleebalang* along with disregardness of the central government to Acehnesse's demand

Second, the well-prepared physical and psychological aspects weakened effect of disadvantage in Aceh's side during the beginning of the act, which appeared as massive detention by the central government and disarmament, this led into the escaping backers. The initial strategy was Tangse defense, which onward replaced by Hasan Saleh for guerrilla system. This rebellion ended peacefully with "Ikrar Lam Teh "

Third, The effect of the rebellion leads to the autonomyization of Aceh special region in religion, tradition, and education. Development in all aspect life of Aceh to be executed.



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya sehingga skripsi yang berjudul “Pemberontakan DI/TII Aceh 1953-1959” ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Sanata Dharma, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Studi Pendidikan Sejarah.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian.
2. Bapak Prof. Dr. P.J. Suwarno, S.H, selaku pembimbing I, yang telah membimbing penulis dan memberi banyak masukan yang mendukung dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
3. Bapak Drs. B. Musidi, M.Pd, selaku Pembimbing II, yang dengan sabar membimbing penulis, memberikan masukan dan pikiran yang mendukung dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
4. Bapak Drs. A. Kardiyat Wiharyanto, M.M, selaku dosen pembimbing akademik, Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah, dan pihak sekretariat Pendidikan Sejarah yang telah memberi dukungan dalam penyusunan skripsi ini khususnya dan dukungan selama penulis menyelesaikan studi di Universitas Sanata Dharma.
5. Staf Perpustakaan Universitas Sanata Dharma, yang telah memberikan pelayanan yang terbaik kepada penulis dalam mendapatkan referensi.
6. Teman-teman Program Studi Pendidikan Sejarah angkatan 2002, serta semua sahabat, terima kasih atas dukungan, persahabatan dan

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kerjasamanya selama penulis menyelesaikan studi di Universitas Sanata Dharma.

7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai upaya penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca sekalian pada umumnya dan bagi Universitas Sanata Dharma pada khususnya.

Yogyakarta, Februari 2007

Penulis

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Kajian Teori.....	10
F. Hipotesis.....	14
G. Metode Penulisan.....	15
H. Metode Dan Pendekatan Penulisan.....	16
I. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II. LATAR BELAKANG</b>	
<b>PEMBERONTAKAN DI/TII ACEH.....</b>	<b>22</b>
A. Pembubaran Provinsi Aceh.....	22
B. Konflik Ulama-Ulebalang.....	27
C. Sikap Acuh Tak Acuh Pemerintah Pusat Terhadap Tuntutan Rakyat Aceh.....	36
<b>BAB III PROSES TERJADINYA PEMBERONTAKAN DI/TII ACEH.....</b>	<b>42</b>
A. Persiapan Pemberontakan.....	42
B. Strategi Pemberontakan.....	46
C. Menuju Penyelesaian.....	54

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

<b>BAB IV AKIBAT PEMBERONTAKAN BAGI ACEH.....</b>	<b>67</b>
<b>BAB V KESIMPULAN.....</b>	<b>74</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>79</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Aceh yang mempunyai ciri khas tersendiri pada sejarah dan kebudayaan masyarakatnya, menjadikan Aceh suatu daerah yang perlu diperhitungkan oleh pemerintah pusat. Aceh memiliki catatan yang panjang tentang perlawanan terhadap Belanda dan integrasi yang minimal dengan wilayah Indonesia lainnya. Minimalnya integrasi ini disebabkan karena pada masa kolonial masyarakat Aceh hampir hampir tidak berhubungan dengan orang-orang nasionalis di berbagai daerah lain di Nusantara. Di lain pihak perjuangan rakyat Aceh dalam revolusi nasional merupakan salah satu perjuangan yang paling menonjol. Peranan Aceh dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia telah menciptakan suatu hubungan istimewa, setidaknya dalam pikiran rakyat Aceh. Merupakan hal yang istimewa juga bahwa Aceh adalah satu-satunya daerah Republik Indonesia yang benar-benar merdeka dan berada di luar kendali Belanda sepanjang periode 1945-1949.<sup>1</sup>

Awalnya berita kemerdekaan ini tidak diketahui di seluruh pelosok tanah air terutama Aceh, yang terletak di ujung Indonesia. Demikian pula Jepang yang dengan sengaja menutupi berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, dengan menyita radio-radio dan juga melarang masuk pegawai Indonesia, kemudian berita resmi dibawa oleh Mr. Hasan dan Dr. Muhammad Amin<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Nazaruddin Syamsudin, *Pemberontakan Kaum Republik*, Jakarta, Grafiti, 1990, hlm 1.

<sup>2</sup> Abdullah Husain, *Peristiwa Kemerdekaan di Aceh*, Jakarta, Balai Pustaka, 1990, hlm 176

Berita kemerdekaan ini disambut bahagia oleh rakyat Aceh yang selama ini mendambakan kemerdekaan menjadi sebuah negara yang memberlakukan Syariat Islam dan rakyat Aceh menyerukan agar Kesultanan Aceh diproklamasikan kembali. Tetapi dengan keadaan yang belum stabil ini pemimpin Aceh masih merasa bahwa belum saatnya untuk merealisasikan permintaan rakyat Aceh dan juga mereka tidak ingin mendahului pemerintah pusat dalam mengambil keputusan.<sup>3</sup> Untuk sementara berpegang pada sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan harapan ini masyarakat Aceh menjadi lebih bersemangat dalam mempertahankan kemerdekaan. Berdirilah organisasi-organisasi kepemudaan, seperti API (Angkatan Pemuda Indonesia) yang akhirnya berubah menjadi BKR (Badan Keinsyafan Rakyat). Dimulailah perlawanan-perlawanan melawan Jepang. Dengan bermodal senjata hasil rampasan dari tentara Jepang dan semangat rakyat Aceh terus berjuang melawan Belanda yang berusaha menduduki kembali tanah air, dengan semboyan mereka yaitu “Merdeka atau mati”.

Presiden Sukarno pernah menyatakan bahwa Aceh adalah “daerah modal” bagi Indonesia, yaitu pada masa revolusi mempertahankan kemerdekaan, di mana Aceh telah banyak memberikan bantuan bagi Indonesia baik menyediakan pejuang maupun dalam bentuk keuangan. Bantuan Aceh pada waktu itu sangat membantu Indonesia, di mana Indonesia sebagai negara yang baru merdeka, sedang berada dalam keadaan yang sangat membutuhkan banyak biaya dan juga tentara untuk mengusir Jepang dan menghalau kedatangan

---

<sup>3</sup> M.Nur El Ibrahimy, *Teungku Muhammad Daud Beureueh*, Jakarta, Gunung Agung, 1982, hlm 42

kembali Belanda. Rakyat Aceh dengan senang hati berjejal membeli obligasi dari pemerintah untuk menyumbat kebocoran keuangan negara, selain itu masyarakat Aceh juga telah menyumbangkan 2 pesawat terbang untuk keperluan Pemerintah Indonesia, semua itu mereka lakukan demi rasa cintanya kepada tanah airnya Indonesia. Kemudian pada waktu Agresi Militer Belanda tahun 1948, Presiden dan wakilnya dalam tahanan Belanda, di Aceh berdiri PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) atas mandat dari Presiden Soekarno, semua biaya ditanggung oleh rakyat Aceh dan masih banyak perjuangan-perjuangan lainnya yang dibiayai oleh rakyat Aceh.

Usaha Belanda untuk menduduki kembali Indonesia khususnya daerah Aceh belum selesai, antara lain yaitu memecah belah persatuan sesama bangsa Indonesia, sehingga kemudian akan mempermudah menguasai Indonesia, dalam hal ini adalah menyalah Aceh. Belanda berusaha memunculkan kembali perseteruan antara kaum *Uleebalang*<sup>4</sup> dan kaum Ulama yang tergabung dalam organisasi PUSA dalam konflik saudara yang pernah terjadi dalam peristiwa perang Cumbok<sup>5</sup>. Pada masa Belanda kaum *Uleebalang* adalah kaki tangan Belanda dan memiliki kedudukan tinggi dalam masyarakat dan banyak mendapatkan keuntungan-keuntungan. Sedangkan pada masa revolusi kaum Ulama<sup>6</sup> berada di barisan paling depan dan banyak mendapat dukungan dari masyarakat. Dari sini kaum *Uleebalang* bertujuan untuk mendapatkan kembali

---

<sup>4</sup> *Uleebalang* adalah kepala Nanggroe yang berpemerintahan sendiri dan diangkat oleh sultan dengan surat pengangkatan yang disebut sarakarta. Istilah ini juga dipakai untuk menunjukkan kaum bangsawan sebagai suatu kelas dalam masyarakat.

<sup>5</sup> *Perang Combok* adalah perang saudara yang terjadi di Aceh, sekitar tahun 1946. yaitu Perang antara kaum Ulama dan kaum *Uleebalang* Aceh yang dimenangkan oleh kaum Ulama.

<sup>6</sup> *Ulama* adalah pemimpin Islam, di Aceh Ulama berakar kuat di masyarakat dan banyak mendapatkan dukungan.

keistimewaan-keistimewaan yang pernah mereka miliki, dengan cara bekerja sama kembali dengan Belanda, yaitu berusaha untuk menyingkirkan kaum Ulama yang telah mengambil alih tempatnya. Perselisihan kedua golongan inilah yang kemudian merupakan salah satu faktor pendorong pecahnya pemberontakan berdarah pimpinan Daud Beureueh.

Tanggal 19 Agustus 1945 berdasarkan ketetapan DE RI yang berkedudukan di Aceh, wilayah Republik Indonesia dibagi menjadi 8 wilayah, dan Aceh ditetapkan sebagai salah satu wilayah karesidenan yang dipimpin oleh Teuku Nyak Arief.<sup>7</sup> Berdasarkan keputusan ini maka Aceh diberikan otonomi untuk mengatur daerahnya sendiri dan memperbaiki struktur pemerintahannya. Daud Beureueh yang pada waktu itu ditunjuk sebagai gubernur Aceh, tetapi banyak yang acuh-tak acuh dan bersikap dingin atas pengangkatan ini. Malahan ada yang mengatakan bahwa pengangkatan ini adalah salah satu usaha dari PUSA<sup>8</sup> untuk mempertahankan eksistensinya. Sebenarnya pemberian status provinsi bagi Aceh ini belum sepenuhnya disetujui, tetapi dari pihak PUSA mengancam jika permintaan ini tidak segera direalisasikan mereka akan pindah ke selatan dan membangun Aceh sesuai dengan yang mereka inginkan.

Pemerintah Pusat berusaha mengirimkan wakil-wakilnya ke Aceh untuk membicarakan pembentukan Propinsi Sumatra Utara yang artinya bahwa wilayah Aceh akan digabungkan. Akhirnya tercapai kesepakatan atas hasil penyelesaian oleh kabinet yang pada waktu itu berdiri yaitu kabinet Natsir,

<sup>7</sup> Depdikbud, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Istimewa Aceh*, Jakarta, Depdikbud, 1983, hlm 182.

<sup>8</sup> PUSA adalah kependekan Persatuan Ulama Seluruh Aceh yang berdiri pada tahun 1939, dipimpin oleh Daud Beureueh. Merupakan wahana kaum muslim untuk berjuang melawan elite tradisional (Uleebalang) pada waktu itu



bahwa Aceh digabungkan bersama Provinsi Sumatra Utara. Tetapi penggabungan ini kemudian akan banyak menimbulkan ekses yang lebih besar lagi.

Kekecewaan rakyat Aceh yang terjadi karena pembubaran propinsi Aceh belum lagi terhapus dari hati rakyat, kekacauan lain lagi ditimbulkan oleh pemerintah pusat<sup>9</sup>. Adanya pembubaran Divisi X yang kebanyakan terdiri atas putra-putra Aceh pada tahun 1951 dan ditambah lagi peristiwa Razia Agustus 1951 yang berupaya untuk mencari dan menyita senjata senjata gelap yang diduga disembunyikan oleh sementara orang dan organisasi.<sup>10</sup>

Karena keputusan yang menumpuk, maka dalam tahun 1953 kaum revolusioner Aceh ini kembali ke pegunungan untuk mengadakan pemberontakan terhadap Pemerintah Pusat yang mereka anggap sebagai pemerintah yang sekuler<sup>11</sup>. Tanggal 21 september 1953 Daud Beureueh mengumumkan dimulainya "Sejarah baru" daerahnya dengan memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) di Aceh<sup>12</sup>. Perlawanan yang dilakukan adalah penyerangan terhadap kota-kota di Aceh, keterlibatan rakyat dalam pemberontakan menunjukkan bahwa perlawanan tersebut bukan merupakan suatu luapan spontan yang hanya berdasarkan kemarahan dan kekecewaan yang menumpuk saja<sup>13</sup>, tetapi merupakan suatu yang sudah lama direncanakan dan dipersiapkan. Dapat dikatakan pemberontakan ini mengalami kegagalan, banyak sebab yang melatarbelakangi, di antaranya bahwa

<sup>9</sup> M. Nur El Ibrahimy, *op. cit.*, hlm 63

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm 70

<sup>11</sup> Audrey Kahin, *Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan*, Jakarta, Grafiti, 1989, hlm 113

<sup>12</sup> Nazzaruddin Syamsudin, *op. cit.*, hlm 83

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm 88

sampai pecahnya pemberontakan itu mereka belum betul-betul siap dalam arti militer, keputusan para Perwira Aceh untuk membatalkan keikutsertaan hanya seminggu sebelum pemberontakan<sup>14</sup>, serta banyak lagi sebab-sebab dari kegagalan pemberontakan ini.

Peristiwa berdarah<sup>15</sup> ini menelan banyak korban, para pemberontak membawa sebagian dari rakyat dan murid-murid sekolah turut serta dalam pertempuran-pertempuran sehingga di antara murid-murid yang tidak berdosa telah banyak jatuh korban<sup>16</sup>. Bersama dengan pembentukan kembali Propinsi Aceh, pembentukan komando militer, dan pemberian status daerah istimewa, pembangunan yang luar biasa dalam bidang pendidikan itu telah mengubah sikap rakyat Aceh terhadap Pemerintah Pusat dan Darul Islam.

Pemberontakan dinyatakan berakhir ketika kelompok Zuama pimpinan Hasan Saleh kemudian mengambil alih kekuasaan Wali Negara Daud Beureueh dan kembali bergabung diri dengan Republik Indonesia pada 15 maret 1959. Walaupun kemudian masih banyak petentangan-pertentangan dari pihak Ulama pimpinan Teungku Muhammad Daud Beureueh. Konsepsi Prinsipil bijaksana dari Syamaun Gaharu ternyata membawa perdamaian bagi Aceh dan KDMA yang kemudian menetapkan Aceh menjadi daerah istimewa yang otonom dalam bidang agama, adat dan pendidikan.

---

<sup>14</sup> *Ibid* hlm 99

<sup>15</sup> Oleh pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastomijoyo peristiwa ini dinamakan Pemberontakan Daud Beureueh sedangkan masyarakat Aceh menyebut Pemberontakan ini sebagai "Peristiwa Berdarah"

<sup>16</sup> Kementerian Penerangan RI. *Keterangan Dan Jawaban Pemerintah Tentang Peristiwa Daud Beureueh* (Jakarta: Kementerian Penerangan RI, 1953). selanjutnya akan dikuti sebagai *keterangan Dan Jawaban Pemerintah*.

## B. Permasalahan

Berdasarkan Latar belakang skripsi ini akan membahas beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a) Apa sebab-sebab yang melatarbelakangi munculnya pemberontakan DI/TII Aceh 1953-1959?
- b) Bagaimana proses terjadinya pemberontakan DI/TII Aceh 1953-1959?
- c) Apa akibat yang ditimbulkan dari pemberontakan DI/TII Aceh 1953-1959 terhadap masyarakat Aceh?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a) Mendiskripsikan dan menganalisis apa yang menjadi latar belakang terjadinya pemberontakan DI/TII Aceh 1953-1959
- b) Menjelaskan dan menganalisis bagaimana berlangsungnya pemberontakan DI/TII Aceh 1953-1959
- c) Menganalisis akibat-akibat apa saja yang ditimbulkan dari pemberontakan DI/TII Aceh 1953-1959

### 2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Universitas Sanata Dharma

Selain untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya bidang penelitian yaitu penelitian untuk Ilmu Pengetahuan Sosial, skripsi ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bacaan yang berguna bagi pembaca dan pemerhati sejarah di lingkungan Universitas

Sanata Dharma maupun di luar lingkungan Universitas Sanata Dharma.

b. Bagi Dunia Pendidikan

Penelitian ini akan menambah wawasan dan perbendaharaan ilmu pengetahuan terutama sejarah dan juga dapat memberi tambahan informasi dan bahan pengajaran di sekolah pada umumnya sehingga dapat menambah pengetahuan siswa.

c. Penelitian ini akan menambah pengetahuan baru bagi penulis mengenai Pemberontakan Darul Islam Aceh 1953-1959 yang terjadi pada masa awal kemerdekaan.

#### D. Tinjauan Pustaka

Penulisan skripsi yang berjudul "Pemberontakan DI/TII Aceh 1953-1959" ini menggunakan beberapa buku sumber yang dijadikan acuan untuk membahas permasalahan, buku-buku sumber yang digunakan antara lain adalah:

*Pemberontakan Kaum Republik, kasus Darul Islam Aceh*, buku ini ditulis oleh Nazzarudin Syamsudin, diterbitkan oleh Grafiti, Jakarta, 1990.

Memuat secara panjang lebar mengenai pemberontakan Darul Islam yang terjadi di Aceh, yaitu dimulai dari menjelang pemberontakan, bagaimana pemberontakan itu terjadi dan bagaimana hubungannya dengan pemerintah pusat yang kemudian menuju penyelesaian pemberontakan Darul Islam ini. Dalam buku ini juga dijelaskan keadaan awal Pemerintahan Indonesia yang masih belum stabil dan alasan mengapa akhirnya rakyat Aceh harus memberontak.

*Teungku Muhammad Daud Beureueh, peranannya dalam pemberontakan di Aceh*, buku ini ditulis oleh M. Nur El Ibrahimy, diterbitkan oleh Gunung Agung pada tahun 1982. Dalam buku ini menjelaskan tentang peran seorang tokoh pemberontakan di Aceh yaitu Teungku Muhammad Daud Beureueh, yang merupakan pemimpin dari pemberontakan. Buku ini menjabarkan secara lebar mengenai peran dan usaha Teungku Daud Beureueh di Aceh pada masa pergerakan kemerdekaan hingga meluasnya Pemberontakan Darul Islam di Aceh.

*Darul Islam sebuah Pemberontakan*, buku ini ditulis oleh C. van Dijk, diterbitkan oleh Graffiti, Jakarta, 1995. Dalam buku ini dijelaskan tentang Darul Islam tidak hanya di Aceh saja tetapi juga daerah-daerah lain yaitu di Jawa Barat dan juga Sulawesi, selain itu dijelaskan pula alasan apa yang sebenarnya membuat rakyat ikut masuk Darul Islam.

*Keterangan Dan Jawaban Pemerintah Tentang Peristiwa Daud Beureueh*. Buku ini diterbitkan oleh Kementerian Penerangan Republik Indonesia yang menrangkan secara jelas tentang bagaimana keterangan pemerintah mengenai peristiwa Daud Beureueh dan juga jawabannya yang berdasarkan pandangan umum DPR serta tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi gejolak daerah Aceh.

*Mengapa Aceh Bergolak*, buku ini ditulis oleh Hasan Saleh, diterbitkan oleh Graffiti, pada tahun 1992. Hasan Saleh adalah seorang yang pada waktu itu merupakan panglima perang dalam Pemberontakan Daud Beureueh. Dalam buku ini Hasan Saleh menuliskan bagaimana jalannya pemberontakan dan ketegangan-

ketegangan yang terjadi, baik Daud Beureueh dengan pasukannya ataupun dengan Pemerintah Pusat..

### **E. Kajian Teori**

Dalam skripsi yang berjudul “Pemberontakan DI/TII Aceh tahun 1953-1959” ini perlu dikemukakan konsep-konsep yang berkaitan dengan judul dan juga tujuan skripsi, judul di atas menggunakan konsep tentang pemberontakan DI/TII. .

Pemberontakan dalam kamus bahasa Indonesia berasal dari kata berontak yang berarti meronta-ronta hendak melepaskan diri, melawan, tidak mau menurut perintah, dan melawan pemerintah (kekuasaan dan sebagainya) secara serentak. Setelah menambahkan imbuhan pe-an, kata berontak menjadi pemberontakan yang berarti penentangan terhadap kekuasaan yang sah<sup>17</sup>. Pemberontakan semacam ini merupakan pemberontakan yang bukan bersifat pribadi semata-mata, akan tetapi digerakkan oleh keinginan untuk menciptakan jenis komunitas yang berbeda dengan komunitas tempat pemberontak itu hidup. Pemberontakan yang dilakukan oleh rakyat Aceh ini sebagai ungkapan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan pemerintah

Pemberontakan yang dibahas dalam skripsi ini terjadi di wilayah Aceh, yang terletak di ujung Sumatera Utara. Sebenarnya jika dirunut secara rinci pemberontakan ini hanya berjalan sangat singkat, tetapi kita lihat dari keadaan pada awal sebelum dan sesudah terjadinya pemberontakan ini keadaannya

---

<sup>17</sup> Anton Mulyana, *Kamus besar bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1990, hlm 40

menjadi sangat bertentangan. Semula rakyat yang dengan bangga hati dan ringan tangan turut serta membantu dan mengorbankan jiwa dan hartanya tiba-tiba menjadi ganas dan bahkan menjadi 100% membalik dari yang sebelumnya. Sebenarnya pemberontakan ini hanyalah salah satu dari serentetan pemberontakan yang terjadi di Indonesia pada masa awal kemerdekaan.

W. F. Wertheim menyatakan bahwa faktor penyebab pemberontakan ini pecah adalah adanya konflik Ulama-Uleebalang. Perselisihan kedua kelompok ini muncul kembali atau lebih tepat berlanjut pada masa sesudah merdeka. Sebab revolusi tidak melahirkan keadaan yang berbeda dari masa sebelumnya. Ali Sastroamijoyo dan Wertheim yakin karena pertikaian itu muncul kembali dan mengancam seluruh Ulama dalam gelanggang politik pada awal tahun 1950-an, kemudian para Ulama mengatasinya dengan mencari dukungan dari Pemerintah Pusat. Tetapi Pemerintah pusat menolak memberikan dukungan dan membiarkan perselisihan itu berlangsung terus. Ulama Aceh menanggapiya dengan menuntut otonomi untuk Aceh. Maka tuntutan otonomi tidak dijadikan penyebab pemberontakan<sup>18</sup>.

Selain itu Hebert Feith menyatakan bahwa pemberontakan di Aceh dilihat sebagai ungkapan aspirasi Islam dan dihubungkan dengan turun naiknya pengaruh Masyumi dalam pemerintahan. Pendapat ini menyiratkan bahwa pemberontakan itu tidak akan terjadi bila Masyumi tidak disisihkan dari kabinet Ali pada pertengahan tahun 1953<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup> Nazaruddin Syamsuddin, *op. cit.*, hlm 3

<sup>19</sup> *Idem*

Menurut M.A Nawawi pemberontakan sebagai akibat konflik antara Aceh dan pemerintah pusat yang timbul karena perbedaan kepentingan. Dalam pandangan ini, kebijaksanaan pemerintah pusat yang mengejar sentralisme melalui birokratisasi telah menyebabkan perselisihan dengan para pemimpin Aceh yang sedang memperjuangkan otonomi daerah mereka. Maka kegagalan pemerintah pusat dalam memberikan otonomi rakyat Aceh menjadi penyebab pemberontakan. Pertikaian Ulama-*Uleebalang* dianggap sebagai penyebab sampingan.<sup>20</sup>

Sedangkan Nazaruddin Syamsudin berpendapat bahwa terdapat 2 pemimpin Islam yaitu Ulama dan Zuama, yang kemungkinan besar terdapat perbedaan pandangan di antara keduanya. Istilah Zuama dalam konteks ini menunjuk pada para pemimpin muslim yang mempunyai cukup pengetahuan tentang Islam, berbeda dari para Ulama yang tidak menganggap pengajaran atau penyebaran agama sebagai profesi mereka. Ulama biasanya memilih pekerjaan yang berhubungan dengan masalah keagamaan dan jabatan-jabatan lainnya mereka serahkan kepada para Zuama, mereka bergabung dalam organisasi PUSA. Kedua golongan ini kemudian mempunyai pandangan yang berbeda tentang akan dibawa kemana Aceh.<sup>21</sup>

Darul Islam ( DI ) dalam bahasa Arab berarti rumah atau keluarga yaitu dunia atau wilayah Islam, dari sini yang dimaksud Darul Islam adalah bagian Islam dari dunia yang di dalamnya keyakinan Islam dan pelaksanaan

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 6-7

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 10



Syari'at Islam dan peraturan-peraturannya diwajibkan.<sup>22</sup> Di Indonesia Darul Islam digunakan untuk menyatakan gerakan-gerakan sesudah 1945 yang berusaha dengan kekerasan untuk merealisasikan cita-cita Negara Islam Indonesia. Dimulainya gerakan Darul Islam adalah di pegunungan Jawa Barat. Pada mulanya pemimpin-pemimpin Islam tunduk kepada UUD 1945, yang nantinya setelah lepas dari Belanda, timbul keinginan mereka untuk mengubahnya menjadi Negara Islam. Tanggal 7 Agustus 1949 Darul Islam diproklamasikan di Jawa Barat oleh Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo, yang kemudian meluas ke berbagai wilayah antara lain yaitu Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Aceh. Selama lebih dari satu dasa warsa Darul Islam terus melancarkan pemberontakan. Baru dalam dasa warsa 60 an tentara Indonesia berhasil menumpasnya di berbagai daerah, Jawa Barat pada tahun 1962, Kalimantan Selatan tahun 1962, Sulawesi Selatan tahun 1965, sedangkan di Aceh lebih lambat munculnya dan berlangsung relatif singkat yaitu 1953 – 1979.

Darul Islam bagaimanapun merupakan bagian dari akibat sampingan proses sosial politik dalam suatu negara yang baru merdeka. Masalah yang menyangkut persoalan yang kompleks antara lain ekonomi di daerah, kewibawaan daerah yang kian terancam atau kekuasaan pusat yang terus menyusut. Sedangkan untuk kasus Aceh, menyangkut persoalan ideologi keagamaan, pemberontakan Darul Islam merupakan perlawanan terhadap pengaruh Pemerintah Pusat yang kian menyusut rakyat.

---

<sup>22</sup> Cornelis Van Dijk, *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*, Jakarta, Grafiti, 1983, hlm 18

Gerakan-gerakan pemberontakan ini dipimpin oleh pemimpin Islam untuk melakukan serangan kepada kaum tradisional atau adat ataupun kepada Pemerintah Pusat. Karena pemimpin-pemimpin Islam yang memainkan peranan penting dalam menggerakkan masyarakat setempat, yang menentang tidak hanya pemerintah tradisional tetapi juga Belanda dan tidak memiliki kontak dengan Pemerintah Pusat sehingga prinsip Islam haruslah dilakukan dalam konteks pemberontakan ini.

#### **F. Hipotesis**

Dengan memperhatikan kajian teori di atas, maka dalam skripsi ini dapat dirumuskan suatu hipotesis yang merupakan jawaban sementara atas beberapa permasalahan di atas antara lain yaitu :

- a) Jika Aceh digabungkan dengan Sumatra Utara, karena terjadi perebutan kekuasaan atas pemerintahan Aceh antara Ulama dan *Ulebalang* dan pemerintah pusat bersikap acuh tak acuh terhadap tuntutan rakyat Aceh maka akan terjadi pemberontakan DI/TII Aceh 1953-1959
- b) Jika pemerintah Pusat menuruti tuntutan otonomi rakyat Aceh maka pemberontakan DI/TII 1953-1959 tidak akan berlangsung lama
- c) Jika pemberontakan DI/TII Aceh 1953-1959 berhasil, maka akan muncul daerah istimewa Aceh yang otonom.

#### **G. Metode Penulisan**

Skripsi dengan judul “ Pemberontakan DI/TII Aceh 1953-1959” ini

menggunakan metode deskriptif analitis. Metode deskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penilaian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagai mana adanya. Metode deskriptif memusatkan perhatiannya pada penemuan fakta-fakta sebagaimana keadaan sebenarnya. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan serta hubungan antar fenomena yang diselidiki mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan atau fenomena yang diselidiki.<sup>23</sup>

Untuk memberikan bobot yang lebih tinggi pada metode ini maka data/fakta yang telah ditemukan tidak hanya sekedar dikumpulkan dan disajikan saja tetapi juga diolah dan kemudian ditafsirkan berdasarkan penemuan-penemuan tersebut. Maka kemudian kita akan menemukan gambaran yang menyeluruh dari sebuah penulisan. Jadi metode deskriptif analitis bersifat teoritis dan mempunyai kerangka konseptual yang jelas.

Dalam skripsi ini permasalahan pokok yang akan dibahas adalah yang pertama mengenai latar belakang terjadinya pemberontakan DI/TII Aceh, kedua tentang bagaimana pemberontakan DI/TII terjadi yaitu mengenai persiapan-persiapan, strategi dan bagaimana pemberontakan itu dapat berakhir kemudian yang terakhir membahas mengenai akibat yang ditimbulkan dari pemberontakan DI/TII Aceh 1953-1959.

## **H. Metode Dan Pendekatan Penelitian**

### **I. Metode Penelitian .**

---

<sup>23</sup> Muh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1992, hlm 65

Dalam skripsi ini penulis menggunakan data historis yaitu melalui dokumen-dokumen yang berupa literature yang ada di perpustakaan yang berbentuk buku. Sesuai dengan metode yang penulis gunakan maka penulis banyak menggunakan buku-buku sumber untuk mengumpulkan data-data untuk diinterpretasikan yang nantinya menghasilkan suatu generalisasi dan jawaban-jawaban atas beberapa permasalahan yang dikemukakan. Adapun sumber-sumber tertulis tersebut didapat pada perpustakaan Samata Dharmia, perpustakaan daerah Yogyakarta, perpustakaan Universitas Negeri Yogyakarta dan lain-lain. Pada penulisan skripsi ini sesuai dengan syarat penulisan sejarah menggunakan empat tahap penulisan sejarah antara lain:

Tahap pertama yaitu berisikan atau proses pengumpulan data yang relevan untuk keperluan menjawab subyek yang diteliti. Sumber data ini diperoleh dari literatur yang ada di perpustakaan. Kuntowijoyo membagi sumber data menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang berasal dari kesaksian seseorang secara langsung menyaksikan suatu peristiwa dengan pancaindranya sendiri atau dalam bentuk tulisan dari pelaku secara langsung. Sumber primer yang digunakan pada tulisan ini adalah buku karangan dari M. Nur El Ibrahimy yang berjudul Teungku Muhammad Daud Beureueh dan buku mengapa Aceh bergolak, tulisan dari Hasan Saleh. Sedangkan sumber sekunder adalah kesaksian yang disampaikan oleh seseorang yang tidak secara langsung menyaksikan atau mengalami suatu peristiwa tersebut. Buku sekunder yang dipakai adalah buku karangan dari Nazaruddin Syamsuddin dengan judul Pemberontakan Kaum Republik, kasus

Darul Islam Aceh.

Tahap kedua yaitu kritik sumber. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian dilakukan kritik sumber yang merupakan suatu tahap untuk melihat dan mengkaji otentisitas (keaslian sumber) dan tingkat kredibilitas (kebiasaan dipercaya)<sup>24</sup> Langkah ini wajib dilakukan untuk menghindari adanya kepalsuan, ketidakeaslian dan juga adanya subyektivitas dari penulis. Kritik sumber dibagi menjadi dua yaitu kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern adalah kritik yang dilakukan untuk mengetahui keaslian sumber yang digunakan, yaitu dengan cara meneliti bahan yang digunakan mengenai sifat bahan, gaya bahasa dan cara penulisan. Kritik Intern ini perlu dilakukan dalam penulisan skripsi ini, karena data dan fakta yang ditemukan tidak sama antara satu dengan yang lain sehingga kebenarannya masih perlu diuji. Sedangkan kritik ekstern adalah kritik untuk mengetahui apakah sumber yang digunakan masih layak pakai atau tidak yang artinya bahwa apakah sumber tersebut benar-benar asli.

Tahap ketiga yaitu interpretasi, hal ini dilakukan setelah melakukan tahap kritik sumber. Fakta dan data yang telah dianalisis dan diuji kebenarannya kemudian diambil suatu penaksiran dan digabungkan menjadi satu sehingga diperoleh rangkaian peristiwa sejarah yang bermakna.

Tahap yang keempat yaitu historiografi atau merekonstruksi peristiwa-peristiwa sejarah melalui proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau<sup>25</sup>. Dalam penulisan sejarah tidak pernah terlepas dari sumber-sumber yang berkaitan, aspek kronologis sangat dibutuhkan dalam

<sup>24</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta, Benteng Budaya, 1995, hlm 99-100

<sup>25</sup> Sartono Kartodirjo, *Pemikiran Dan Perkembangan Historiografi Indonesia Suatu Alternatif*, Jakarta, Gramedia, 1989, hlm 70

penulisan sejarah sehingga memberikan gambaran yang jelas dalam suatu penulisan sejarah .

## 2. Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan multidimensional yaitu menggunakan berbagai pendekatan ini sebagai pendukung. Penggambaran suatu peristiwa sangat tergantung pada pendekatan, yaitu dari segi, dimensi dan unsur-unsur mana yang diungkapkan, dan hasil pelukisannya akan sangat tergantung oleh jenis pendekatan yang dipakai<sup>26</sup>. Pendekatan multidimensional merupakan pendekatan yang paling tepat untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini, yaitu untuk melihat gambaran yang lebih bulat dan menyeluruh mengenai kecenderungan-kecenderungan yang tumbuh pada masyarakat Aceh. Pendekatan yang dipakai yaitu pendekatan sosial dan politik.

Pendekatan politik juga digunakan untuk melihat permasalahan bahwa dalam masyarakat Aceh terdapat suatu permasalahan intern antara *uleebalang* yaitu kaum tradisional dalam hal ini adat dengan kaum ulama atau pemimpin islam Aceh yang sama-sama mengambil alih kekuasaan dan ingin menjadi penguasa tertinggi di Aceh. Cara-cara seperti apa yang kemudian mereka gunakan untuk saling menjatuhkan lawannya. Selain untuk melihat hal diatas pendekatan politik dapat digunakan untuk melihat bagaimana pemerintah pusat

---

<sup>26</sup> Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta, Gramedia, 1992, hlm 4

dalam memperlakukan masyarakat Aceh, yang menginginkan suatu otonomi di wilayah Aceh.

Pendekatan sosiologis menurut Hasan Shadily bertujuan untuk mempelajari manusia sebagai anggota, golongan atau masyarakat yang diikat oleh adat, kebiasaan, kepercayaan atau agama, tingkah laku atau kesesuaiannya.<sup>27</sup> Pendekatan sosiologis dalam skripsi ini digunakan untuk melihat keadaan masyarakat Aceh, yaitu keadaan pada awal kemerdekaan. Masyarakat Aceh telah banyak berkorban baik jiwa maupun harta bagi Indonesia, keadaan rakyat Aceh yang sangat tertinggal dengan keadaan di daerah daerah lain, baik dalam hal pendidikan ataupun yang lainnya. Oleh karena itu Aceh juga memiliki kekhasannya tersendiri yang berbeda dengan masyarakat lain, sehingga bentuk otonomilah yang dianggap paling tepat untuk memperbaiki keadaan masyarakat Aceh pada waktu itu.

#### **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi "Pemberontakan DI/TII Aceh 1953-1959" ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, secara garis besar memuat mengenai keterkaitan antara latar belakang masalah dengan permasalahan yang akan dibahas. Bab ini menguraikan mengenai rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, kajian teori, metode dan pendekatan penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan.

---

<sup>27</sup> Hasan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, 1994, hlm 82

BAB II, pada Bab ini berisi pembuktian hipotesis pertama yaitu mengenai latar belakang pecahnya pemberontakan DI/ TII Aceh 1953-1959, yaitu sebab-sebab dan juga faktor yang mendorong terjadinya pemberontakan, sebab-sebab tersebut antara lain yaitu ketidakpuasan rakyat Aceh terhadap Pemerintah Pusat atas sikap acuh tak acuh, permasalahan otonomi Aceh, dan terjadinya perebutan kekuasaan atas pemerintahan Aceh antara kaum Ulama dan Uleebalang.

BAB III, pada Bab ini merupakan pembuktian hipotesis yang kedua yaitu tentang bagaimana proses terjadinya pemberontakan DI/TII Aceh 1953-1959, antara lain mengenai persiapan-persiapan pemberontakan dan strategi yang digunakan dalam pemberontakan DI/TII Aceh 1953-1959.

BAB IV, pada Bab ini merupakan pembuktian hipotesis ketiga yaitu mengenai akibat-akibat yang ditimbulkan dari peristiwa Pemberontakan DI/ TII Aceh 1953-1959 bagi masyarakat Aceh, yaitu bahwa Aceh kembali mendapatkan otonomi dan tidak digabungkan dengan Sumatra Utara, yaitu menjadi salah satu daerah Istimewa di negara Indonesia.

BAB V Kesimpulan, pada Bab ini berisi mengenai apa yang telah dibahas dari ketiga permasalahan tersebut dan merupakan ringkasan dari inti permasalahan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya. Pada bab kesimpulan ini berisi mengenai keseluruhan jawaban dari permasalahan.



## BAB II

### LATAR BELAKANG TERJADINYA

### PEMBERONTAKAN DI/ TII ACEH

Republik Indonesia yang merdeka dari penjajahan bangsa asing, setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 banyak mengalami tantangan, hambatan, dan ancaman dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa<sup>28</sup>. Dalam perjalanan selanjutnya banyak muncul ancaman terhadap keutuhan bangsa yang berasal dari daerah-daerah. Darul Islam yang muncul pada masa awal kemerdekaan, pertama kali muncul di Jawa Barat oleh Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo yang kemudian merambat dan menyebar hingga ke Sulawesi, Jawa Tengah hingga ke ujung Sumatra yaitu Aceh.<sup>29</sup>

Aceh yang merupakan jantung dalam anatomi Negara Kesatuan Republik Indonesia karena dari sinilah awal kali pertama dukungan untuk Indonesia datang baik berupa dukungan moral maupun tenaga dari masyarakat setempat. 15 Oktober 1945 masyarakat Aceh sepakat menyatakan menjadi bagian dari Republik Indonesia. Berbagai bantuan masyarakat Aceh serahkan tanpa mengenal imbalan, bahkan Presiden Republik Indonesia Soekarno, menyatakan bahwa Aceh merupakan daerah modal bagi Republik Indonesia.

Rakyat Aceh merasa dianaktirikan, masyarakat Aceh merasa tidak dipedulikan setelah apa yang mereka perbuat. Muncullah gerakan Darul Islam yang serupa seperti yang pernah muncul di Jawa Barat, masyarakat Aceh

<sup>28</sup> Muhammad Gade Ismail, *Tantangan Dan Rongrongan Terhadap keutuhan Dan Kesatuan Bangsa: Kasus Darul Islam Di Aceh*, Jakarta, Depdikbud, 1983, hlm 1

<sup>29</sup> Cornelis Van Dijk, *op. cit.*, hlm 18

menyatakan bahwa mereka merupakan bagian dari Negara Darul Islam. Pemberontakan yang dipimpin oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh ini tidak berlangsung lama, tetapi memiliki akibat yang bekepanjangan. Perlu dirunut kembali sebenarnya apa yang menjadi latar belakang munculnya pemberontakan Darul Islam ini oleh masyarakat Aceh, beberapa alasan tersebut antara lain adalah .

#### **A. Pembubaran Propinsi Aceh**

Indonesia masih belum stabil pada masa awal kemerdekaan, Jepang walaupun telah kalah oleh Sekutu tetapi masih tinggal dan juga Belanda yang mulai datang kembali dan mencoba untuk menguasai kembali Tanah Air Indonesia. Sedangkan pemerintah Indonesia sendiri belum memperlihatkan suatu keberhasilan, selain itu gangguan dalam negeri masih sering muncul yaitu gerakan-gerakan dari masyarakat dari berbagai daerah.

Ketika Belanda melancarkan aksi militernya yang kedua dan menangkap aparat pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta, pemerintah segera memberikan mandat kepada Syafruddin Prawiranegara agar Pemerintahan dipindahkan ke Bukit Tinggi<sup>30</sup>. Pemerintahan ini mula-mula berkedudukan di Bukit Tinggi, kemudian di Banda Aceh. Setelah Juli 1949 kabinet lama telah dibebaskan oleh Belanda pemerintah darurat dibubarkan dan jabatan wakil Perdana Menteri untuk Sumatera segera dipilih Syafrudin Prawiranegara. Mengingat perhubungan antara Jawa dan Sumatra masih sangat sulit, Syafrudin

<sup>30</sup> Ajip Rosidi, 1986, *Syafruddin Prawiranegara, Lebih Takut kepada Allah S.W.T.*, Jakarta, Inti Idayu Press, hlm 291

Prawiranegara berhak membuat peraturan yang mempunyai kekuatan hukum sesudah seperlunya minta pendapat Dewan Pertimbangan Agung dan para anggotanya (Undang-undang No.2 1949)<sup>31</sup>.

Syafrudin Prawiranegara segera menghadapi permasalahan di Aceh yaitu tuntutan yang keras dari pemerintah PUSA untuk memberikan status provinsi. Dalam pandangan masyarakat Aceh, yang menjadi alasan bagi masyarakat Aceh mengapa mereka menginginkan berdiri menjadi sebuah propinsi, alasan-alasan pokoknya adalah yang pertama bahwa dalam bidang sosial ekonomi rakyat Aceh merasa telah tertinggal jauh dari rekan-rekan mereka dalam propinsi Sumatra Utara yang bahkan bahwa justru dalam bidang inilah kepentingan Aceh berbeda dari kepentingan daerah-daerah lain<sup>32</sup>. Selain itu rakyat Aceh merasa sangat ketegangan dalam hal teknologi dasar (Pendidikan), infrastruktur pertanian dan komunikasi, mereka yakin bahwa pemerintah propinsi yang baru tidak akan dapat memberikan perhatian penuh terhadap Aceh. Alasan lain yaitu bahwa terdapat perbedaan sosio kultural yang nantinya akan memvulitkan hubungan keduanya, yang terakhir dalam bidang politik adalah bahwa Aceh merupakan satu kesatuan sejak dahulu dan akan menjadi pecah jika kiblatnya diubah ke Medan serta Aceh hanya akan mendapatkan dominasi dari Sumatera Utara<sup>33</sup>.

Syafrudin Prawiranegara menggunakan kekuasaan istimewanya pada tanggal 17 Desember 1949 yaitu mengeluarkan peraturan yang mempunyai kekuatan peraturan pemerintah, yang menyatakan bahwa Sumatra Utara terbagi

<sup>31</sup> Cornelis Van Dijk , *op. cit.*, hlm 273

<sup>32</sup> Nazarudin Syamsudin, *op. cit.*, hlm 38-39

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 40

dalam dua Provinsi: Provinsi Aceh (termasuk sebagian Langkat), dan Provinsi Sumatra Timur (Peraturan Wakil Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No.8 1949)<sup>34</sup>. Mukadimah peraturan ini menyebutkan pembentukan propinsi Aceh merupakan masalah yang mendesak yang tidak mengikuti prosedur hukum biasa. Pembentukan sebuah propinsi baru yang secara biasa terjadi oleh Undang-Undang DPR, pada tempo ini digantikan oleh Peraturan Perdana Menteri tanpa berkonsultasi dengan dewan-dewan dalam pemerintahan dengan alasan keadaan yang mendesak guna memperbaiki struktur pemerintahan<sup>35</sup>.

Langkah Syafrudin Prawiranegara ini mendapatkan berbagai tantangan antara lain berasal dari para pemimpin Sumatra Utara, mereka menyalahkan Syafrudin Prawiranegara karena sebelum mengambil keputusan tersebut tidak berkonsultasi dengan gubernur Sumatra Utara dan juga DPRD Sumatra Utara terlebih dahulu, Syafrudin Prawiranegara juga disalahkan karena hanya berunding dengan tokoh Aceh dan Tapanuli saja. Para pemimpin Sumatra Utara menganggap bahwa pembentukan propinsi Aceh ini hanyalah sebagai upaya bagi para pemimpin PUSA untuk mempertahankan dan meluaskan pengaruhnya di Aceh.

Terdapat beberapa implikasi yang timbul jika Aceh lepas dari Sumatra Utara yaitu, Sumatra Utara akan kehilangan wilayah seluas 55.000 Km<sup>2</sup>, artinya akan kehilangan sejumlah pemilih pada pemilu 1955 sebanyak 542.565 suara, hal ini berdampak pada kepentingan politik Sumatra Utara yaitu pada

---

<sup>34</sup> Depdikbud, *Tantangan Dan Rongrongan Terhadap Keutuhan Dan Kesatuan Bangsa; Kasus Darul Islam Di Aceh*, Depdikbud, Jakarta, 1994, hlm 109. Selanjutnya akan diikuti sebagai *Tantangan Dan Rongrongan*.

<sup>35</sup> Cornelis Van Dijk, *op. cit.*, hlm 273

kepemilikan kursi di parlemen. Sedangkan bagi Masyumi, Aceh merupakan daerah penting karena hampir seluruh rakyat Aceh merupakan simpatisan Masyumi.<sup>36</sup>

Dampak lain dalam bidang ekonomi jika Aceh berdiri sebagai propinsi adalah Sumatra Utara akan mengalami banyak kerugian, yang pertama adalah penyulingan dan pelabuhan minyak Pangkalan Brandan Sumatra Utara tergantung pada minyak mentah dari tambang minyak yang berada di seberang perbatasan yaitu di Aceh Timur. Dalam bidang perkebunan Sumatra Utara juga mendapatkan pengaruh yaitu jika Aceh mengalihkan eksportnya ke daerah lain maka akan mengurangi perdagangan ekspor impor Sumatra Utara.

Selain mendapatkan tanggapan dari para pemimpin Sumatra Utara langkah dari Syafrudin Prawiranegara ini juga mendapatkan penolakan dari Pemerintah Pusat yang pada waktu itu telah kembali ke Yogyakarta, Pemimpin di Yogyakarta yakin bahwa pendirian propinsi ini tidak konstitusional. Syafrudin menolak hal ini, ia menyatakan bahwa pembentukan Provinsi Aceh telah mendapat persetujuan dari kabinet Hatta<sup>37</sup>. Tetapi Pemerintah Yogyakarta tetap menolak hal ini, penolakan semakin nyata ketika pelantikan Gubernur Daud Beureueh tidak ada satu orang pun yang diwakilkan untuk menyaksikan. Walaupun terdapat kotroversi, secara diam-diam berkembanglah suatu kondisi yang bersifat akomodatif, orang Aceh tetap melaksanakan pemerintahan secara *de facto*, sedangkan pemerintah Yogyakarta tetap diam saja dengan aspek *de jure* propinsi Aceh. Agaknya pemerintah Yogyakarta menerima *status quo* propinsi

<sup>36</sup> Nazarudin Syamsudin, *op. cit.*, hlm 38-39

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm 35

Aceh<sup>38</sup>. Mengapa hal ini dilakukan oleh Pemerintah Pusat, sebenarnya adalah untuk menghindarkan adanya konfrontasi langsung dengan rakyat Aceh. Sejumlah senjata masih ada di tangan orang-orang Aceh dan juga pemerintah menunggu para pemimpin daerah agar bergerak pada pembentukan sebuah negara kesatuan dan menunggu adanya reorganisasi pemerintah. Pemerintah yakin adanya perubahan nanti tidak akan ditentang oleh rakyat Aceh jikalau perubahan merupakan kepentingan republik.

Pernyataan terbuka mengenai penolakan ini belum dikeluarkan hingga dikirimkannya suatu misi pencari fakta ke Aceh. Pemerintah di Yogyakarta membentuk komisi penyelidikan yang diketuai oleh Susanto Tirtoprojo. Kemudian komisi penyelidikan ini berkunjung ke Aceh dan dengan berhati-hati menginformasikan bahwa Pemerintah Pusat belum mengambil keputusan apakah benar-benar Aceh menjadi sebuah provinsi<sup>39</sup>. Tentu saja berita ini tidak diterima baik oleh rakyat Aceh, mereka mengancam tidak akan bertanggungjawab pada keamanan Aceh bahkan mereka sempat mengajukan tuntutan, yaitu jika pengangkatan Aceh sebagai sebuah provinsi tidak disetujui maka mereka mengancam akan mengungsi ke hutan dan membentuk Negara Aceh sendiri sesuai dengan kehendak mereka. Walaupun terdapat penentangan dari pihak Aceh, suatu panitia persiapan pembentukan Propinsi Sumatra Utara didirikan 1 Agustus 1950 yang diketuai oleh S. Parman Reksodiharjo<sup>40</sup>.

Apa yang terjadi selanjutnya adalah Aceh benar-benar menjadi wilayah Sumatra Utara sesuai dengan hasil keputusan Peraturan Pemerintah Penganti

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm 40

<sup>39</sup> Muhammad Gade Ismail, *op. cit.*, hlm 59-60

<sup>40</sup> Cornelis Van Dijk, *op. cit.*, hlm 274

Undang-Undang No.5 1950, tentang pembentukan Provinsi Sumatra Utara<sup>41</sup>. Rakyat Aceh bersama Daud Beureueh yang merupakan pemimpin Ulama yang terpendang pada waktu itu mulai menyusun kekuatan untuk melawan Pemerintah Pusat. Dengan berkiblat pada gerakan yang dicetuskan oleh Katuswiryo, Daud Beureueh bersama rakyat Aceh memberontak dengan label Darul Islam, pecahlah pemberontakan pada 21 September 1953.

### **B. Konflik Ulama Dan Uleebalang**

Satu hal yang tidak dapat dibantah bahwa dalam memantapkan suasana sehingga Daud Beureueh melancarkan pemberontakan terhadap pemerintahan pusat adalah pertentangan antara Ulama dan *Uleebalang* yang merupakan faktor mendasar. Sebenarnya pertentangan ini sudah berakar lama dalam sejarah Aceh, akan tetapi terpendang sekian lama dalam lubuk hati kedua golongan yang senantiasa bersaing itu<sup>42</sup>. *Uleebalang* merupakan pembantu Sultan dalam mengurus kebijakan atau ketentuan-ketentuan yang telah diputuskan oleh Sultan bersama hakim, dan kebijakan ini tidak bisa diubah kecuali Sultan sendiri yang mengubahnya<sup>43</sup>. Secara Tradisional *Uleebalang* menduduki jabatan pemerintah lokal di Aceh yaitu pejabat Sultan Aceh, akan tetapi dalam prakteknya mereka bebas merdeka, terutama setelah melemahnya kekuasaan Sultan, *Uleebalang* semakin menggerogoti Sultan<sup>44</sup>. Sedangkan Ulama secara tradisional merupakan

<sup>41</sup> Tantangan Dan Rongrongan, *op. cit.*, hlm 111

<sup>42</sup> M. Nur El Ibrahimy, *op. cit.*, hlm72

<sup>43</sup> Rani Usman, A, *Sejarah Peradaban Aceh*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2003, hlm 49

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm 3

pemimpin spiritual dalam masyarakat Aceh yang sangat dihormati dan mendapatkan dukungan yang luas dalam masyarakat Aceh.

Sejak tahun 1939 Ulama Aceh telah memiliki wahana utama para Ulama Islam Aceh bernama PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) mereka menamakan dirinya Teungku berbeda dengan para *Uleebalang* yang menyebut diri mereka Tengku. Teungku adalah gelar pejabat pemerintahan tradisional di dalam lingkungan Gampong (Desa) di daerah Aceh. Teungku bertindak sebagai kepala dalam urusan keagamaan di Desa. Jabatan ini diperoleh tidak secara turun-temurun, melainkan berdasarkan pemilihan yang dilakukan oleh rakyat Aceh. Segala keputusan yang bersifat keagamaan biasanya dilakukan dengan persetujuan Teungku. Maka dengan hal ini Teungku mendapatkan kedudukan penting dan dihormati oleh masyarakat<sup>45</sup>. Sedangkan Tengku yaitu gelar kebangsawanan yang dipergunakan untuk menyebut bangsawan atau keturunan raja di berbagai daerah yang berkebudayaan melayu di Indonesia<sup>46</sup>. Organisasi PUSA kuat berakar dalam masyarakat Aceh, sehingga dengan mudah melaksanakan pengaruhnya di Aceh.<sup>47</sup>

Dua perkembangan penting yang menandai masa kolonial dan revolusi dalam sejarah Aceh adalah turun naiknya pengaruh politik kaum Ulama dan *Uleebalang*<sup>48</sup>. Selama masa kekuasaan Belanda dan juga selanjutnya yaitu Jepang, menganut kebijaksanaan yang sama yaitu mendukung wibawa para *Uleebalang* sebagai penguasa yang berdaulat di wilayah masing-masing ( yang

<sup>45</sup> NN, *Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 16*, Jakarta, PT. Cipta Adi Pustaka, 1991, hlm 285

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm 234

<sup>47</sup> M. Nur El Ibrahimy, *op. cit.*, hlm 257

<sup>48</sup> Nazarudin Syamsudin, *op. cit.*, hlm 16



di sebut Nangro) dan membatasi pengaruh kaum Ulama. Kekuasaan yang dimiliki oleh kaum *Uleebalang* sebenarnya merupakan hasil dari usaha mereka dalam menggerogoti kekuasaan dan memperkosa hak-hak dari pemerintah Sultan di Kutaraja. Sejak melemahnya kekuasaan Sultan sesudah abad ke-17, *Uleebalang* tidak mau tunduk lagi kepada kekuasaan Sultan. Banyak hal yang mereka lakukan, antara lain adalah bea cukai yang masuk di perdagangan luar negeri tidak lagi disetor kepada pemerintah di Kutaraja, akan tetapi masuk ke kantong mereka sendiri, selain itu banyak *Uleebalang* yang mengadakan sergapan terhadap kapal-kapal Inggris dan merampok muatannya, sehingga banyak negara asing yang menuduh Sultan Aceh yang melakukannya. Sultan pun tidak berdaya mencegah *Uleebalang* melakukan perbuatan-perbuatan yang tentu saja mencemarkan nama baik nya, *Uleebalang* melangkah semakin jauh yaitu menggunakan perampokan untuk memeras rakyat yang menjadikan mereka tuan tanah yang kaya-raya<sup>49</sup>.

Bagi Belanda hal ini merupakan pucuk dicinta ulam tiba, karena apa yang dicita-citakan untuk menakhluakkan Aceh akan segera terlaksana, dengan melihat mulai terjadinya perpecahan di Aceh yaitu antara Ulama dan *Uleebalang*.. Melihat kemungkaran yang semakin berkembang yang banyak dilakukan oleh para *uleebalang*, kaum Ulama tidak berpangku tangan saja mereka mengajak kaum *Uleebalang* untuk kembali ke jalan yang benar dan memperbaiki lembaga-lembaga pemerintahan Aceh yang sudah bobrok, tetapi dakwah kaum Ulama ini disalahartikan oleh *Uleebalang*. Mereka menganggap

---

<sup>49</sup> M. Nur El Ibrahimy, *op. cit.*, hlm 73-74

dakwah kaum Ulama ini berbahaya bagi kedudukan dan sumber pendapatan mereka<sup>50</sup>. Padahal apa yang sedang diusahakan oleh kaum Ulama ini adalah hanya untuk kelangsungan Aceh dan tidak seperti yang para *Uleebalang* pikirkan.

Pada mulanya Sultan Aceh, *Uleebalang* dan Ulama bersama-sama berjuang mati-matian melawan penjajah pada Agresi Militer Belanda I, tetapi sangat disayangkan pada Agresi militer II semangat itu lenyap. *Uleebalang* lebih memihak Belanda, banyak di antara mereka menandatangani perjanjian-perjanjian dengan Belanda yang dinamakan *Uniform Model Korte Verklaring*<sup>51</sup>, di mana Belanda mengakui *Uleebalang* sebagai raja di daerahnya<sup>52</sup>. Hal ini membuat pertentangan antara Ulama dan *Uleebalang* semakin tajam. Maka pecahlah perang saudara di Aceh setelah beberapa bulan Jepang menyerah. *Uleebalang* diserang oleh Ulama dan para pengikutnya di seluruh Aceh. Dalam konflik tersebut motif ekonomi dan politik lebih memerankan bagian utama dibandingkan motif keagamaan.

Setelah peristiwa tersebut jabatan-jabatan pamong praja menjadi kosong, lowongan ini harus segera diisi, jika tidak akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Lowongan-lowongan tersebut segera diisi oleh pihak yang menentang seperti lazimnya terjadi dalam setiap revolusi, yaitu Ulama atau PUSA. Tetapi yang menjadi pertimbangan utama dalam pengangkatan ini adalah tenaga-tenaga asli yang tidak pro feodal dan mempunyai pengaruh di kalangan rakyat

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm 76

<sup>51</sup> Contoh *Uniform Model Korte Verklaring*, lihat M.Nur El Ibrahim, *Teungku Muhammad Daud Beureueh*, Jakarta : Gunung Agung, 1987, hlm 260

<sup>52</sup> M. Nur El Ibrahimy, *op. cit.*, hlm 79

serta mampu bertindak dalam setiap kesulitan, mengenai keahlian dan pengalaman kerja adalah soal yang kedua, sebab keadaan yang masih bergolak pada waktu itu menghendaki sifat-sifat yang demikian<sup>53</sup>.

Dengan revolusi sosial ini Ulama berhasil menyapakan peranan penting sosial, politik dan ekonomi kaum *Uleebalang*. Kemudian dalam perjalanannya kemudian di kalangan pengikut-pengikut PUSA sendiri timbul perpecahan yang disebabkan terutama tentang pembagian kedudukan dan juga harta benda rampasan, sehingga timbullah gerakan Sajid Ali<sup>54</sup> pada tahun 1947<sup>55</sup> dengan program *Programma Van Actie*<sup>56</sup>. Gerakan ini tidak berlangsung lama dan dapat dielakkan, maka PUSA tetap berada di barisan depan melawan kembalinya Belanda.

Dibentuknya propinsi Aceh oleh Syafrudin Prawiranegara pada tahun 1950, tidak membawa banyak perubahan. Ketidakpuasan baik terhadap keadaan ekonomi yang berlaku maupun dugaan perebutan kekuasaan yang dilakukan pemimpin-pemimpin PUSA meletus tahun 1948, tuduhan adanya korupsi besar-besaran, perdagangan gelap, pembunuhan lawan-lawan politik, diabaikannya pemerintah pusat dan penyelewengan pendapatan dari ladang-ladang minyak dan perkebunan<sup>57</sup>. Munculnya tuduhan-tuduhan ketidakpuasan rakyat Aceh terhadap

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm 109

<sup>54</sup> Sajid Ali adalah gerakan yang memperlihatkan ketidakpuasan yang diakibatkan oleh hal-hal yang dinilai kurang tepat, kurang wajar dan merugikan rakyat yang banyak dilakukan oleh tokoh-tokoh dalam pemerintahan, yang dipimpin oleh Sajid Ali Al Sagaf. Sumber: Amin.SM, 1978, *Kenang-Kenangan dari masa lampau*, pradnya paramita, Jakarta

<sup>55</sup> Keterangan Dan Jawaban Pemerintah, *op. cit.*, hlm 22

<sup>56</sup> M Nur El Ibrahimy, hlm 123

<sup>57</sup> Cornelis Van Dijk, *op. cit.*, hlm 269

PUSA ini membuka jalan bagi para *Uleebalang* yang ingin kembali mengambil haknya yaitu untuk kembali menjadi penguasa di Aceh.

Suasana politik Aceh semakin hari semakin menjadi panas dan PUSA tidak henti-hentinya menyusun kembali kekuatannya<sup>58</sup>. Kampanye untuk mempertahankan propinsi Aceh terus dilakukan, satu hal yang paling penting dalam hal ini adalah pengalihan dukungan Pemerintah Pusat dari pemimpin PUSA kepada lawan-lawan mereka, terutama kepada sisa-sisa *Uleebalang*. Tetapi dalam hal ini tidak berarti bahwa Pemerintah Pusat lebih menyukai kaum *Uleebalang* dari pada pemimpin-pemimpin PUSA<sup>59</sup>. Perubahan sikap dari Pemerintah Pusat pada awalnya adalah ketika Pemerintah Pusat sedang memusatkan perhatiannya pada masalah konsolidasi pemerintahan di seluruh nusantara, khususnya yang menyangkut struktur pemerintahan lokal, sayangnya salah satu sekutu lokalnya yang setia selama revolusi telah menghalangi secara tegas. Karena rakyat Aceh menentang konsolidasi ini, para Pemimpin Pusat pun merasa dipermalukan dan sebagai akibatnya berusaha mengurangi pengaruh politik PUSA di daerah itu<sup>60</sup>. Dengan keputusan yang demikian maka dapat dilihat bahwa sebenarnya Pemerintah Pusat tidak sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh PUSA yaitu menginginkan otonomi daerah Aceh. Pemerintah Pusat mulai menentang PUSA, dan ini berarti bahwa Pemerintah Pusat berkawan dengan kaum *Uleebalang* karena apa yang diinginkanya sejalan yaitu sama-sama ingin menjatuhkan kaum Ulama yang berada di dalam PUSA.

<sup>58</sup> Keterangan Dan Jawaban Pemerintah, *op. cit.*, hlm 26

<sup>59</sup> Nazarudin Syamsudin, *op. cit.*, hlm 108

<sup>60</sup> *Ibid* hlm 16

PUSA merupakan organisasi yang berakar kuat dalam masyarakat Aceh dan memiliki pendukung yang banyak pula. PUSA merupakan kekuatan daerah Aceh yang menginginkan suatu balasan dari apa yang telah ia berikan kepada masa revolusi. Pemerintah Pusat sadar bahwa mungkin sekali PUSA menjadi oposisi yang kuat terhadap cita-cita Pemerintah Pusat untuk menegakkan kewibawannya di daerah. Jika ditinjau dari sudut ini, maka kelangsungan kegiatan dari *Uleebalang* merupakan durian runtuh bagi para pemimpin Pusat, sebab kegiatan tersebut memberikan kesempatan kepada pemimpin nasionalis untuk menjadi Kuda Troya dalam pertikaian antara Ulama dan *Uleebalang*. *Uleebalang* semakin bersemangat mengkampanyekan anti PUSA dan juga menjelekkkan PUSA dengan menuduh keterlibatan PUSA atas pembunuhan dan perampasan harta kekayaan para kaum *Uleebalang* selama masa revolusi. Tetapi perlu diketahui juga bahwa tidak hanya kaum Ulama saja yang pada waktu itu duduk dalam Majelis Penimbang<sup>61</sup> yang menerima manfaat dari harta kaum *Uleebalang*. Kenyataannya banyak pemimpin pada tingkat nasional juga telah ikut menerima dan menggunakan harta rampasan tersebut.

Dalam pertentangan Ulama-*Uleebalang* ini, *Uleebalang* tidak berusaha menggugat Pemerintah Pusat melainkan hanya mempengaruhi hubungan pemerintah dengan para pemimpin PUSA. Kaum *Uleebalang* telah memperkirakan bahwa bilamana mereka mengajukan gugatan mengenai status dan posisi mereka di Aceh Pemerintah Pusat akan menolaknya, seperti apa yang terjadi di Sumatra Timur. Pemerintah Pusat bersedia menyelesaikan persoalan

---

<sup>61</sup> Majelis Penimbang: adalah suatu majelis setaraf peradilan di Aceh yang pada waktu itu dikhususkan untuk mengurus harta rampasan hasil dari revolusi melawan Uleebalang, di dalamnya banyak duduk para Ulama.

harta benda Uleebalang tanpa menempatkan mereka kembali pada pemerintahan lokal.

Dalam penyelesaian pertentangan antara kaum Ulama dan *Uleebalang* ini perlu diuraikan Majelis Penimbang yang merupakan komponen yang besar dan penting dalam masalah pertentangan ini. Majelis Penimbang dibentuk berdasarkan PERDA No I tahun 1946<sup>62</sup> dan mempunyai hak dan kewajiban mengurus harta benda peninggalan dari para *Uleebalang* dalam peristiwa Cumbok<sup>63</sup>. Sementara sikap pemerintah menimbulkan masalah keabsahan peraturan daerah yang dibuat pada masa revolusi<sup>64</sup>. Orang-orang yang duduk dalam Majelis Penimbang itu sendiri yang tersangkut, maka keputusan-keputusan yang diambilnya tidak adil dan dalam hal-hal yang sulit mereka main menghambat-hambat dan jika ada keputusan-keputusan maka ada pula yang tidak dipenuhi oleh yang memegang harta rampasan itu sehingga menambah keruwetan<sup>65</sup>. Para *Uleebalang* mencurigai adanya penyelewengan oleh beberapa pemimpin PUSA yang duduk dalam majelis penimbang itu. Anggapan dari kaum *Uleebalang* bahwa tuntutan pembentukan propinsi Aceh ini merupakan upaya Ulama PUSA untuk menyembunyikan penyelewengan mereka dan menyelamatkan status mereka dan sebenarnya rakyat tidak begitu mempersoalkan status ini.<sup>66</sup>

Pada masa sesudah Revolusi yang diikuti oleh pembubaran Propinsi Aceh oleh Pemerintah Pusat pada 14 Agustus 1950 yaitu pada masa

<sup>62</sup> S. M. Amin., *op. cit.*, hlm147

<sup>63</sup> M. Nur El Ibrahimy, *op. cit.*, hlm 143

<sup>64</sup> Nazarudin Syamsudin, *op. cit.*, hlm 111

<sup>65</sup> Keterangan Dan Jawaban Pemerintah, *op. cit.*, hlm 30

<sup>66</sup> Nazarudin Syamsudin, *op. cit.*, hlm 112

kepemimpinan kabinet Natsir, merupakan saat yang sulit bagi para Ulama PUSA khususnya yang pada waktu itu duduk dalam pemerintahan Aceh. Bersamaan dengan pembubaran propinsi, sejumlah pegawai diganti, selain itu juga diadakan mutasi besar-besaran untuk mengganti pejabat-pejabat dan tokoh-tokoh yang dianggap pro PUSA dan menggantinya dengan memasukkan para pejabat non-Aceh untuk menggantikannya<sup>67</sup>. Selain dipindahkan para pejabat juga dikurangi kekuasaan dalam setiap bidang yang dikerjakannya, sehingga ruang geraknya semakin sempit. Adanya pendepakan ini merupakan pembalikan sikap pemerintah pusat terhadap Aceh, mereka menjadi frustrasi sebab bukannya menghargai peranan yang mereka mainkan dalam revolusi pada masa lalu, Pemerintah Pusat kini malah tampak tidak mempedulikan dan bahkan menghina mereka dengan menempatkan mereka di bawah pejabat yang baru datang dan masih muda.<sup>68</sup>

Setelah membahas mengenai perpecahan antara Ulama dan *Uleebalang* kiranya perlu diketahui pula bahwa dalam badan Ulama sendiripun kemudian terjadi perpecahan, yang dalam hal ini adalah perbedaan pandangan di antara keduanya yaitu antara Ulama dan Zuama. Istilah Zuama dalam konteks ini menunjuk pada para pemimpin muslim yang mempunyai cukup pengetahuan tentang Islam tetapi berbeda dari para ulama, tidak menganggap pengajaran atau penyebaran agama dengan cara lain sebagai profesi mereka. Ulama biasanya memilih pekerjaan yang berhubungan dengan masalah keagamaan dan jabatan-jabatan lainnya mereka serahkan kepada para Zuama. Tetapi keduanya ini tetap

---

<sup>67</sup> Tantangan Dan Rongrongan, *op. cit.*, hlm 62

<sup>68</sup> Nazarudin Syamsudin, *op. cit.*, hlm 116

bergabung dalam organisasi PUSA. Kedua golongan ini kemudian mempunyai pandangan yang berbeda tentang akan dibawa kemana Aceh, mengenai pemerintahan maupun hal-hal yang lainnya.<sup>69</sup>

### **C. Sikap Acuh Tak Acuh Pemerintah Pusat terhadap Tuntutan Rakyat**

#### **Aceh**

Ketika Negara Republik Indonesia sedang menghadapi Agresi Militer I dan II kegiatan ekonomi praktis berhenti sama sekali. Keadaan ini menyebabkan Pemerintah Pusat mengalami kesulitan dana untuk membiayai pemerintah. Untuk itu dibutuhkan sumbangan dari pemerintah daerah.<sup>70</sup> Melihat keadaan Pemerintah Pusat yang demikian maka Pemerintah Daerah Aceh yang tidak tinggal diam begitu saja, seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa Pemerintah Daerah Aceh mampu mewujudkan keinginan Pemerintah Pusat yaitu Aceh mampu memberikan bantuan ekonomi bagi Pemerintah Pusat. Aceh mampu menyediakan dana untuk pembelian pesawat udara dan masih banyak lagi usaha Aceh dalam membantu Republik Indonesia.

Dapat dikatakan bahwa Masyarakat Aceh telah mengorbankan segala-galanya untuk membela Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu dapatlah dipahami apabila Presiden Soekarno memberi gelar daerah Aceh sebagai “Daerah Modal” bagi Indonesia<sup>71</sup>. Tapi rupanya masa-masa manis itu dengan cepat berlalu Pemerintahan Sukarno dan Daud Beureueh tidak konsisten. Ketidakconsistenan Daud Beureueh tak terlepas dari berbagai kekecewaan rakyat

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm 10

<sup>70</sup> Tantangan Dan Rongrongan, *op. cit.*, hlm 40

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm 43



Aceh terhadap perilaku dan sikap yang ditunjukkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang telah mereka dukung sepenuhnya pada masa-masa sulit. Titik awal kekecewaan itu adalah ketika berlangsungnya sidang Dewan Menteri Republik Indonesia Serikat pada Agustus 1950 di Jakarta. Sidang memutuskan wilayah Indonesia di bagi dalam 10 daerah tingkat I (Propinsi), dalam hal ini Provinsi Aceh dilebur ke dalam Pemerintah Provinsi Sumatera Utara<sup>72</sup>. Dalam usaha agar Provinsi Aceh tidak jadi dibubarkan, silih berganti utusan dikirim ke pusat. Di sana para delegasi diterima dengan pintu kamar terbuka, tetapi dengan pintu hati tertutup, setiap alasan delegasi mereka dengarkan dengan sabar tetapi tetap permohonan tetap di tolak.<sup>73</sup>

Keadaan Aceh saat itu menjadi sangat tegang, ternyata kesetiaan mereka selama ini tidak menjadi perhatian Pemerintah Pusat memberikan nilai lebih kepada Aceh. Setelah pembubaran ini Gubernur Sumatera Utara digantikan oleh Abdul Hakim, beliau melakukan suatu tindakan yang dapat dikatakan menambah panasnya hati rakyat Aceh, dalam kedatangannya ke Aceh segala apa yang ditemuinya selalu dicela, bahkan ia tidak berusaha untuk menemui Daud Beureueh yang merupakan orang yang memegang jabatan tersebut sebelum digantikan olehnya.

Sementara itu pemerintah Jakarta dan Sumatera Utara khawatir rakyat Aceh akan melakukan suatu tindakan yang merugikan, maka diambillah sebuah langkah preventif yaitu dengan memutasikan semua kesatuan militer Aceh ke luar daerah yang tentu saja berbeda dari mulai adat, sikap dan lain-lainnya,

---

<sup>72</sup> Sanusi Pane, *op. cit.*, hlm 8

<sup>73</sup> Hasan Saleh, *op. cit.*, hlm 130

kemudian kesatuan militer Aceh digantikan dengan kesatuan dari luar daerah. Tindakan ini menimbulkan banyak tindakan provokatif baik dari masyarakat maupun dari kesatuan militer Aceh. Sebenarnya tujuan dari tindakan preventif ini adalah agar para pemimpin dan rakyat Aceh yang tidak tahan melihat dan merasakan penghinaan itu bangkit melawan pemerintah sehingga akan ada alasan resmi untuk membungkam mereka selama-lamanya.<sup>74</sup>

Persoalan berikutnya yang meluapkan perlawanan di Aceh adalah penangkapan besar-besaran yang dilakukan di seluruh Indonesia atau yang biasa disebut sebagai "Razia Agustus" kurang lebih 1500 orang ditangkap. Penangkapan ini berdasarkan instruksi dari Dr. Suliman, yaitu agar seluruh senjata yang masih berada ditangan rakyat dikembalikan kepada pemerintah karena perang melawan Belanda telah selesai, instruksi ini bagaikan pucuk dicinta ulam tiba bagi Natsir yaitu seorang komunis. Dr. Sukiman dan Natsir bersatu dalam cara walaupun berbeda tujuan. Keduanya saling membantu menangkap tokoh-tokoh perjuangan dan menjebloskan mereka dalam penjara dengan alasan menyimpan senjata gelap. Sebenarnya sasaran dari razia ini adalah orang komunis, tapi di Aceh sasarannya justru adalah lawan-lawan komunis<sup>75</sup>.

Tindakan-tindakan Pemerintah Pusat terhadap para pemimpin Aceh inilah yang menyebabkan rakyat Aceh kehilangan kepercayaan kepada Pemerintah Pusat. Rakyat Aceh merasakan bahwa perjuangan mereka selama masa revolusi ternyata dibalas dengan air tuba oleh Pemerintah Republik Indonesia. Apalagi jika mengingat janji Presiden Sukarno, hati rakyat Aceh

---

<sup>74</sup> Hasan Saleh, *op. cit.*, hlm 136

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm 137

semakin teriris. Saat pertama kali berkunjung ke Aceh 16 Juni 1948, Presiden Soekarno atas nama Allah sempat bersumpah akan memberikan hak kepada Aceh untuk menyusun rumah tangganya sendiri sesuai dengan Syariat Islam. Sukarno berjanji akan mempergunakan pengaruhnya agar rakyat Aceh nantinya benar-benar akan dapat melaksanakan Syariat Islam di daerahnya. Janji inilah rupanya hanya isapan jempol belaka, yang ada justru Provinsi Aceh dibubarkan dan dilikuidasikan ke provinsi Sumatra Utara.<sup>76</sup>

Dalam bidang politik, Pemerintah Pusat mengganti pejabat-pejabat Aceh sesudah pembubaran provinsi Aceh. Membarjinya para pejabat non Aceh ini menambah frustasi rakyat Aceh. Tidak sebatas itu saja dalam bidang ekonomi Pemerintah Pusat melarang sistem perdagangan barter yang telah lama dilakukan antara Aceh dan Melayu pada awal tahun 1952, larangan ini hampir menghancurkan sama sekali kelangsungan ekonomi para elite PUSA. Pembatasan kegiatan perusahaan-perusahaan tersebut berarti kehilangan dana yang terutama dibutuhkan untuk membiayai pengembangan sekolah-sekolah agama. Pemerintah Pusat juga menghentikan subsidi atas ratusan sekolah agama pada tahun 1952.<sup>77</sup>

Konflik kepentingan antara para pemimpin PUSA dan Pemerintah Pusat menumbuhkan ketegangan dalam masyarakat Aceh. Sementara pemimpin-pemimpin PUSA semakin kecewa atas kebijaksanaan-kebijaksanaan Pemerintah Pusat yang dinilai sangat mengecewakan, di samping itu Pemerintah Pusat tetap pada pendiriannya yaitu berusaha mengurangi pengaruh PUSA di Aceh, yang

---

<sup>76</sup> Sanusi Pane, *op. cit.*, hlm 9

<sup>77</sup> Nazarudin Syamsudin, *op. cit.*, hlm 117

merupakan angin segar dan keinginan bagi kaum *Uleebalang* yang sejak dulu menginginkan kembali kekuasaannya di Aceh..

Tuntutan PUSA bagi rehabilitasi jalan, irigasi dan pendidikan telah diabaikan pemerintah, sementara tingkat kehidupan masyarakat semakin buruk, karena pendidikan terkena akibat pelarangan perdagangan barter. Situasi yang seperti ini di satu pihak memang dapat mengarahkan kekecewaan rakyat terhadap PUSA, akan tetapi selain kampanye yang sering sekali diadakan oleh kaum *Uleebalang* tidak ada perlawanan sosial yang timbul untuk menentang pemimpin-pemimpin PUSA sebab mereka telah menguasai massa. Hal ini tidak saja disebabkan oleh adanya ikatan keagamaan antara elite dan massa, melainkan juga karena kemampuan para pemimpin PUSA untuk menyingkapkan bahwa Pemerintah Pusatlah yang menjadi biang keladi yang sesungguhnya<sup>78</sup>. Masyarakat Aceh yang di daerah hanya tahu bahwa tindakan yang dikenakan kepada mereka tak lebih dan tak kurang dari penghinaan dan penipuan dari Pemerintah Pusat<sup>79</sup>.

Keadaan Aceh semakin mengalami kemunduran, ditambah dengan kebijaksanaan ekonomi Pemerintah Pusat yang melarang adanya perdagangan barter dan penolakan Pemerintah Pusat untuk memperbaiki sistem irigasi, sehingga sawah-sawah terpaksa diabaikan. Dengan keadaan yang demikian dapat dibayangkan bagaimana kehidupan ekonomi rakyat Aceh menjadi semakin terbengkalai, ditambah lagi dengan timbulnya akibat dari reorganisasi militer yang telah disebutkan di atas yang menimbulkan banyaknya pemuda yang

---

<sup>78</sup> *Ibid* hlm 118

<sup>79</sup> Taufik Abdullah, *Islam Dan Masyarakat*, Jakarta, LP3ES, 1987, hlm 186

mengganggu. Sekolah-sekolah ditutup karena subsidi dihentikan, keadaan sulit yang semakin lama semakin menumpuk ini membuat rakyat Aceh semakin frustrasi dan kecewa terhadap Pemerintah Pusat.

Berbagai kebijaksanaan dan sikap-sikap dari Pemerintah Pusat, telah menimbulkan kekecewaan yang menumpuk pada masyarakat Aceh. Telah jelas bahwa penyebab utama pemberontakan ini meletus adalah frustrasi yang meluas dalam masyarakat Aceh atas segala bentuk kebijakan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Aceh, kebijakan tersebut dianggap sebagai suatu bentuk ketidakpedulian Pemerintah Pusat atas apa yang terjadi di daerah. Pada intinya masyarakat Aceh merasa bahwa mereka merasa dianakirikan setelah apa yang mereka berikan kepada Pemerintah Pusat, seperti pepatah air susu di balas air tuba

### BAB III

#### PROSES TERJADINYA PEMBERONTAKAN DI/TII ACEH

##### A. Persiapan Pemberontakan

Keinginan dari rakyat Aceh agar daerahnya ditangani dengan Syariat Islam ternyata tak bisa ditawar-tawar lagi, ketika Provinsi Aceh dipisahkan dan dilikuidasikan ke Sumatra Utara, rakyat Aceh merasa jengkel dan kecewa terhadap Pemerintah Republik Indonesia pimpinan Sukarno. Dalam kongres Alim Ulama pada 21 April 1953 Daud Beureueh melontarkan himbauan agar para Ulama memperjuangkan dalam pemilu 1955 supaya Republik Indonesia menjadi Negara Islam Indonesia (NII)<sup>80</sup>. Kemudian pada awal Januari 1955 dibentuklah sebuah Kabinet NII yang bersifat presidensial di Aceh. Ide ini sejalan dengan cita-cita sejumlah tokoh Islam radikal, terutama Jawa Barat yang telah diproklamasikan oleh Kartosuwiryo pada 7 Agustus 1949 yaitu NII (Negara Islam Indonesia).

Tungku Daud Beureueh mulai turun ke seluruh Aceh untuk mematangkan dan menyulut pemberontakan. Dalam suatu tabligh akbar yang diadakan di Beureun, setelah memaparkan bagaimana pentingnya status otonomi untuk Aceh, ia juga membakar semangat pendengarnya sedemikian rupa sehingga jika waktu itu juga ia memerintahkan semua rakyat naik gunung, tentulah tanpa pikir panjang lagi rakyat akan melakukannya. Selain mematangkan moral rakyat, segala jenis senjatanya mulai dikumpulkan. Divisi

---

<sup>80</sup> Sanusi Pane, *op. cit.*, hlm 9

militer dibentuk dengan kedok “Pandu Islam”. Karena gerakan ini melibatkan rakyat banyak, maka kebocoran rencana tidak dapat dicegah<sup>81</sup>, rencana ini telah bocor dan sampai pada Bung Hatta. Sehingga Bung Hatta mendatangi Teungku Daud Beureueh dan menanyakan kebenaran dari berita tersebut dan Teungku sendiri membenarkan hal tersebut. Dengan yel-yel “*Maju jalan, Kapuhabeuh Ulebalang; satu dua, ka koh tkue kaum raja; kiri kanan kapoh mandum si ureung nyan*”<sup>82</sup> dengan ini kaum feodal Aceh merasa terancam dan tampaknya kaum raja akan digyang habis-habisan.

Latihan-latihan militer terus dilakukan, Pandu Islam semakin hari semakin bertambah sehat dan pengikutnya bertambah banyak. Mereka juga menerima latihan militer dari prajurit-prajurit militer berpengalaman, antara lain dengan metode penyerangan dan penyerbuan. Latihan terus dilakukan dengan tidak mengenal waktu, baik itu siang maupun malam hari<sup>83</sup>. Dalam konsep perjuangan Darul Islamnya, Daud Beureueh tidak menyebut-nyebut bahwa Aceh dan DI/TII di daerah lain akan memisahkan diri dari Republik Indonesia hanya mengulirkan gagasan menjadikan Republik Indonesia dengan semangat, cita-cita dan sistem Negara Islam. Jadi tidak ada semangat separatis yang dikumandangkannya selain semangat kesatuan Republik Indonesia<sup>84</sup>.

Dukungan demi dukungan datang dari para pemuka masyarakat di Aceh, yang membuat Daud Beureueh semakin gencar mensosialisasikan NII ke

---

<sup>81</sup> Hasan Saleh, *op. cit.*, hlm 150

<sup>82</sup> Artinya Maju jalan, habiskan Uleebalang; satu dua, potong lehernya kaum raja; kiri kanan bunuh semua mereka itu.

<sup>83</sup> Tantangan Dan Rongrongan, *op. cit.*, hlm 49

<sup>84</sup> Sanusi Pane, *op. cit.*, hlm 10.

seluruh Aceh. Sebagai gubernur militer tentu saja Daud Beureueh juga telah mempunyai tentara pendukung yaitu TII ( Tentara Islam Indonesia ), lengkaplah sudah persiapan menuju cita-cita. Suasana Aceh menjadi sangat revolusioner, ditambah dengan adanya bendera Darul Islam yang bergambar bintang dan bulan sabit putih di atas dasar merah. Barisan yang terdiri atas pemuda, pelajar, guru dan penduduk kampung itu memulai serangan terhadap pasukan pemerintah di Aceh Timur dan utara pada tanggal 19 September dan serangan menjalar ke kabupaten-kabupaten lain pada hari-hari berikutnya<sup>85</sup>. Objek dari gerakan ini adalah jajaran komando dan aparatur Pemerintah Republik Indonesia di Aceh, serta golongan feodal yang menyebabkan semua kepedihan itu terjadi. Karena itu di samping penyerangan-penyerangan pos-pos militer, gerakan ini juga menangkap sisa-sisa kaum feodal yang tidak bersimpati kepada pengembalian Propinsi Aceh.

Kekecewaan rakyat Aceh sampai ke telinga Imam NII Kartosuwiryo, yang segera mengirim utusan yaitu Abdul Fatah yang sebenarnya adalah Mustafa Rasjid untuk mendekati para pemimpin Aceh pada awal tahun 1952. Melalui Abdul Fatah, Kartosuwiryo mengirimkan sebuah salinan dakwahnya tentang gerakan Darul Islam dan mengajak para pemimpin Aceh untuk bergabung.<sup>86</sup> Hal ini mendapatkan sambutan yang baik dari pemimpin PUSA, kali ini Abdul Fatah diangkat sebagai kuasa usaha NII di Sumatra dengan tugas membina gerakan Darul Islam di pulau itu, sampai Daud Beureueh setuju mendukung Darul Islam dan membawahkan Aceh pada NII.

---

<sup>85</sup> Nazarudin Syamsudin, *op. cit.*, hlm 84

<sup>86</sup> *Ibid.*, hlm 89



Persiapan-persiapan yang dilakukan sebelum pecahnya pemberontakan ini menjadi sangat rumit ketika melihat ketidakberuntungan Aceh dalam hal militer yang sebenarnya merupakan alat utama pendukung gerakan ini, akibat dari razia Agustus yang dilakukan pemerintah, di samping itu dukungan moral dari masyarakat Aceh mudah didapatkan. Jalan lain yang diambil yang juga merupakan sarana untuk memunculkan ide-ide fisik bagi berlangsungnya pemberontakan ini adalah konferensi PUSA yang dilakukan bersama-sama antara Ulama, pemuda dan wanita.

Dengan berjalannya persiapan-persiapan, akhirnya tibalah saatnya menentukan dicetuskannya pemberontakan. Dari titik pandangan ideologis hari yang paling cocok adalah 7 Agustus 1953, yaitu hari di mana Kartosuwiryo memproklamasikan NII Jawa Barat. Tanggal lain yang disebut adalah 17 Agustus yang bertepatan dengan Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia, tetapi pada pertemuan selanjutnya belum dipastikan sampai selambat-lambatnya pertengahan September bila persiapan-persiapan belum selesai. Akhirnya tanggal 21 September 1953, satu hari setelah presiden Sukarno membuka Pekan Olah Raga Nasional di Medan, Daud Beureueh mengumumkan dimulainya "Sejarah Baru" daerahnya dengan memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indoneisa di Aceh<sup>87</sup>. Sebagian alat Negara telah menyebrang ke TII (Tentara Islam Indonesia), beberapa di antaranya lengkap dengan pasukan yang lainnya dengan sebagian anggota pasukannya. Simpatisan pemberontakan ini tetap

---

<sup>87</sup> Hasan Saleh, *op .cit.*, hlm 403.

tinggal di kota dan memberikan laporan yang sangat berharga serta amunisi yang diperlukan<sup>88</sup>. Tidak diadakan upacara yang meriah, hanya naskah proklamasi dan sebuah keterangan politik yang dibacakan dan disebar di Indrapuri dan daerah Aceh lainnya<sup>89</sup>, yang menandakan bahwa Aceh telah memulai perjuangannya menuntut otonomi untuk daerahnya.

## B. Strategi Pemberontakan

Gerakan yang pecah pada 21 September 1953 membuat keadaan Aceh sangat kacau. Kehidupan sehari-hari menjadi terganggu, yang disebabkan hampir seluruh lapisan rakyat ikut bergabung dengan pemberontak ataupun secara tidak langsung hanya ikut mendukung saja. Rencana akan pendudukan kota-kota besar tidak berhasil, pasukan dan kekuatan Darul Islam hanya berhasil menduduki satu dari tujuh kota kabupaten dan dua dari dua puluh satu kota kawedanan, tapi bukan berarti bahwa pasukan pemerintah sepenuhnya menguasai kota-kota tersebut. Jika dirunut sejak awal pecahnya pemberontakan ini sudah menunjukkan kekurangkompakan dari anggota Darul Islam.

Kesepakatan waktu untuk pencetus pemberontakan saja tidak menunjukkan kekompakan. Faktanya adalah bahwa Darul Islam telah gagal merebut daerah perkotaan pada minggu-minggu pertama pemberontakan tersebut. Banyak di antara para pendukungnya yaitu kalangan pemerintahan yang kembali ke jawatan semula, walaupun tetap setia kepada teman-teman

---

<sup>88</sup> Hasan Saleh, *op. cit.*, hlm 233

<sup>89</sup> Nazarudin Syamsudin, *op. cit.*, hlm 83

mereka di daerah-daerah pedesaan<sup>90</sup>. Walaupun hanya sebagian kecil telah diduduki oleh pemberontak, terjadi suatu kekosongan dalam pemerintah daerah yang menimbulkan banyak kekacauan yang semakin membuat keadaan masyarakat Aceh kacau balau.

Agustus 1953 Hasan Ali memimpin rapat di Binjai untuk membahas strategi dan tanggal pemberontakan, rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah perwira Aceh. Dalam rapat tersebut diputuskan bahwa para pemimpin Aceh akan mengumumkan pembentukan NII di Aceh pada tanggal 21 September 1953. Ditetapkan pula bahwa sehari sebelumnya perwira-perwira Aceh akan membantu gerakan Ulama Sumatra Timur dengan menangkap sejumlah pemimpin nasional, termasuk Presiden Sukarno yang diangka akan menghadiri Upacara pembukaan Pekan Olah Raga Nasional. Jika melihat dari hasil pertemuan ini sangat berbeda dengan tujuan awal dari para Ulama Aceh, jelas di sini bahwa para perwira militer Aceh sedang merencanakan suatu kudeta terhadap pimpinan Nasional Soekarno, sementara kaum Ulama hanya menginginkan pemisahan Aceh dari Jakarta dan menggabungkannya dengan NII.

Strategi yang sangat bertentangan inipun akhirnya mengalami kegagalan, Pemberontakan Darul Islam yang dibantu para Perwira Sumatra Timur ini tidak berhasil merebut kota-kota Aceh dan juga rencana dari Perwira Aceh. Kegagalan ini menjadi jelas ketika kita melihat faktor-faktor apa yang melatarbelakangi kegagalan tersebut. Faktor pertama yaitu mengenai kesiapan dalam bidang militer. Walaupun daya juang dan semangat untuk maju rakyat

---

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm 87

<sup>91</sup> *Ibid*, hlm 96

Aceh sangat tinggi, tetapi militer belum benar-benar siap. Dapat kita ketahui bahwa kekuatan militer Aceh telah dimutasikan ke daerah-daerah lain, selain itu satu hal yang penting bahwa hubungan luar negeri belum pula dipikirkan, sehingga kaum pemberontak ini tidak dapat mengharapkan adanya pengiriman senjata dari daerah lain. Sehingga dapat dibayangkan apa yang dapat dilakukan apabila militer tidak memenuhi dalam arti pasukan hanya beberapa gelintir saja dan juga senjata yang hanya merupakan hasil rampasan dari pasukan Pemerintah Pusat ditambah tidak adanya dukungan sama sekali dari pihak lain.

Gerakan yang dirahasiakan juga merupakan salah satu faktor penyebabnya. Kerahasiaan ini menimbulkan keutaran-kesukaran dalam komunikasi antar anggota, sehingga koordinasi untuk bersama-sama secara serentak melancarkan pemberontakan di seluruh daerah menjadi terhambat. Kurangnya koordinasi menimbulkan keragu-raguan di daerah-daerah, dan hal ini merupakan kesalahan yang fatal, menyebabkan penguasa militer Aceh menjadi waspada sehingga pada 20 september 1953 dilangsungkan operasi militer yang akan menangkap anggota-anggota pemberontak<sup>92</sup>. Hal ini membuat para pemimpin pemberontakan melupakan rencananya dan lari untuk menyelamatkan diri masing-masing. Selain dua faktor di atas adalah para organisator kekurangan waktu untuk menyusun rencana. Tertangkapnya Abdul Fattah dalam suatu razia di Jakarta membuat Pemerintah Pusat mengetahui bahwa terdapat hubungan antara Daud Beureueh dengan Kartosuwiryo, dan juga rencana Darul Islam ini telah diketahui oleh Pemerintah Pusat sejak Mei 1953.

---

<sup>92</sup> *Ibid*, hlm 99

Strategi awal dari gerakan ini yaitu kekurangkompakkan para pembesar di Aceh. Konflik untuk masalah strategi yang terjadi dalam gerakan ini, yaitu Teungku Daud Beureueh yang merupakan pemimpin gerakan Darul Islam dengan Hasan Saleh yang merupakan Mantan Komandan TNI. Sebenarnya yang paling berhak memberikan komando dalam masalah strategi ini adalah Panglima Teungku Daud Beureueh dan Hasan Saleh seorang kapten yang baru saja menyelesaikan tugas di Indonesia Timur tidak mempunyai hak untuk mengubahnya.

Konflik strategi ini muncul sebagai salah satu usaha untuk mempertahankan markas besar di Keumala. Awalnya Daud Beureueh memerintahkan untuk mempertahankan pasukannya di Masjid Garut yang merupakan markas besarnya. Walaupun Masjid tersebut sebenarnya telah dikepung dari berbagai arah secara strategis maupun statis oleh musuh yaitu dengan memblokir makanan dan menunggu habisnya peluru pasukan Darul Islam. Melihat keadaan seperti ini Hasan Saleh yang merupakan Kapten berpengalaman memerintahkan kepada Mayor Ibrahim Saleh seorang komandan Resimen I Gajah Putih Divisi Tengku Chik Di Tiro untuk menarik pasukannya dari masjid Garut<sup>93</sup>. Tetapi tentu saja hal ini ditolak oleh Komandan Resimen ini karena takut dimarahi oleh atasannya yaitu Daud Beureueh, tapi Hasan Saleh menekankan “ *Yang paling penting bukan kemarahan atasan yang kurang menguasai seluk beluk pertempuran melainkan keselamatan pasukan, jangan biarkan modal perjuangan ini tetap tinggal dalam Killing Ground yang sengaja*

---

<sup>93</sup> Hasan Saleh, *op. cit.*, hlm 238

*disiapkan musuh* “. Akhirnya Komandan Resimen setuju untuk menarik pasukannya.

Ketika sedang berjalan mundur, pasukan musuh mengejar dan menembaki pasukan pemberontak. Kemudian untuk mengatasi ini Hasan Saleh mengumpulkan pasukan pada sebuah tanggul kayu untuk berpidato. Pidato ini yang nantinya dikenal sebagai komando *Pantai Tiro* yang isinya,

*Pertama*, mereka yang memanggul senjata sebagai pasukan inti agar memecah dalam pasukan kecil dipimpin seorang komandan dan kembali ke tempat asalnya masing-masing untuk melakukan gerilya, *kedua* para pembesar mulai dari camat ke atas agar mengikuti Hasan Saleh ke Tangse, *ketiga* para Imam mukim dan partisan lainnya agar kembali ke kampung dan bekerja seperti biasa dengan kewajiban membantu kelancaran perang gerilya. Komando umum dipimpin oleh komando resimen masing-masing. Sebagai pelaksana penguasa perang gerilya.

Pidato ini dilaksanakan selama 10 menit, dan langsung dijalankan. Sebenarnya ide yang ditunculkan oleh Hasan Saleh ini sangat berseberangan dengan apa yang dikomandokan oleh Tengku Daud Beureueh yang memerintahkan berhadapan frontal /langsung dengan pasukan pemerintah, sedangkan Hasan Saleh menggantinya dengan memecah pasukan dan menyebarkan ke daerah-daerah dan melakukan gerilya, menurut Hasan Saleh strategi ini dianggap lebih aman dan menyeluruh.

Setibanya di Tangse pasukan bersama Hasan Saleh segera melapor kepada Panglima Teungku Daud Beureueh dan melaporkan tentang segala tindakan dan tidak lupa Tri Komando Gerilya yang telah dijalankan. Ternyata Tengku Daud Beureueh menyalahkan ketiga komando tersebut dan meminta kepada Hasan Saleh untuk memperbaikinya. Satu strategi yang sangat tidak

dibenarkannya adalah membagi-bagikan pasukan, menurut Teungku semua pasukan harus dikerahkan untuk mempertahankan Tangse sehingga musuh akan sulit menyerang. Hasan Saleh tetap dengan pendiriannya dan bertanya “ Apa alasan Tengku untuk terus mempertahankan tempat ini (Tangse), perlindungan udara, persediaan peluru, dan lainnya. Dan apakah dengan berada jauh dengan masyarakat , mereka tidak akan dikuasai pihak musuh nantinya?, malah sekarang lebih baik menyiapkan perang gerilya dari pada setelah kondisi kita memburuk. Cepat atau lambat, kita akan banyak memperoleh keberuntungan”<sup>94</sup>.

Tetapi Teungku Daud memang yang paling berhak memutuskan, Ia tetap menolak strategi Hasan Saleh, akhirnya Teungku Daud Beureueh mengeluarkan sebuah dekrit untuk pemukiman seluruh pasukan agar kembali ke Tangse, kemudian tanpa sepengetahuan Hasan Saleh pasukan dipindahkan untuk mempertahankan Cice Meulinteung, sedangkan komando resimennya ditetapkan di Bengga. Sebagai seorang bawahan, Hasan Saleh harus tetap menyetujui hal tersebut walaupun tidak sesuai dengan keinginan hatinya, dan selanjutnya meneruskan tugasnya meninjau dan memperbaiki keadaan daerah- daerah .

Dalam perjalanan mengamati keadaan prajurit yang ditugaskan untuk mempertahankan Tangse terlihat pucat dan kurang tidur, di samping senjata peluru sudah tidak lagi mencukupi. Dengan keadaan yang seperti ini dikhawatirkan akan munculnya sikap selanjutnya dari para prajurit, keadaan yang payah dikhawatirkan mereka akan bertindak sendiri-sendiri dan akan merugikan perjuangan dan disamping itu juga lawan akan semakin kuat, mereka

---

<sup>94</sup> *Ibid*, hlm 242

tentu saja memiliki banyak waktu luang untuk menghimpun kekuatan untuk menghancurkan pertahanan di Tangse yang sangat mereka ketahui keadaannya. Situasi yang demikian ini dilaporkan Hasan Saleh kepada Imam yaitu Teungku Muhammad Daud Beureueh, Hasan Saleh mengatakan “ Jika kita terus pasif di Tangse sedangkan lawan aktif, maka kita tinggal menunggu kemusnahan, dengan alasan ini saya mengharapkan Teungku mengosongkan Tangse dan beralih ke perang gerilya “ Jawaban Teungku masih sama yaitu menolak ajakan tersebut, Teungku menganggap bahwa semua itu sama saja dengan tiga komando Gerilya yang dulu pernah dibatalkan.

Situasi buah simalakama adalah apa yang dialami oleh Hasan Saleh kali ini, jika Hasan Saleh patuh atas apa yang yang diperintahkan oleh Teungku, pasukan yang tidak berdosa diikat nabis oleh musuh dan pemberontakan akan berakhir tanpa hasil, tetapi jika Hasan Saleh tidak mematuhi perintah Teungku Daud Beureueh, maka kemarahan dan kutukan akan datang dari Teungku dan kawan-kawannya seperjuangannya. Keputusan telah bulat dan segera diambil oleh Hasan Saleh. Ia segera turun ke Bengga dan mengadakan pertemuan kecil dengan para stafnya. Perang frontal diubah menjadi sistem gerilya yang artinya di sini bahwa perintah dari Teungku telah dilanggar. Walaupun berbagai penjelasan telah diberikan tentang keuntungan gerilya, tetapi komandan resimen tidak berani melaksanakan rencana ini tanpa Teungku <sup>95</sup>.

Diperlukan kesabaran menghadapi hal ini, komandan resimen memang tidak salah mengambil keputusan itu, Hasan Saleh yang pada waktu itu hanya

---

<sup>95</sup> *Ibid*, hlm 248



menjabat sebagai Kapten sebenarnya memang tidak berhak untuk memberikan komando ini. Tetapi dengan bujukan dari Nyak Adam dan juga karena pertimbangan yang lainnya maka rencana ini dilaksanakan juga. Melalui telepon kawat waktu itu komandan resimen menghubungi Daud Beureueh untuk segera mengosongkan Glee Meulinteng, karena pasukan akan bergerilya. Walaupun dengan marah Tangse pun segera dikosongkan, dan benar keesokan paginya pasukan pemerintah menyerbu Glee Meulinteng, Teungku Daud Beureueh dan pasukan lainnya menuju ke Geumpang. Sebanyak pasukan di Geumpang menyusul Pasukan Teungku Daud Beureueh, kedatangannya tidak mendapatkan sambutan tetapi Hasan Saleh merasa lega, karena perjuangan telah terselamatkan.

Menjadi sebuah pertanyaannya bagi Hasan Saleh ketika keesokan paginya, ia meminta sebuah surat tugas kepada Teungku Daud untuk mempermudah pekerjaannya, isi surat tugas tersebut adalah "*Demi kelancaran perjuangan, saya perintahkan kepada saudara Hasan Saleh untuk melaksanakan tugas-tugas panglima di seluruh wilayah Aceh dan daerah-daerah sekitarnya*". Dengan surat ini maka wewenang Hasan Saleh adalah besar sekali yaitu sebagai Pelaksana Tugas Panglima. Dari sini muncul pertanyaan apakah sebenarnya Teungku Daud menyetujui tindakan Hasan Saleh sebelumnya?.

September 1955 PUSA mengadakan kongres di Batee Krueng, banyak hal yang dibicarakan mulai dari laporan-laporan yang begitu panjang, lengkap dan juga sangat rapi semuanya diungkapkan dalam kongres tersebut. Kemudian dalam kongres ini melahirkan Status NBA (Negara Bagian Aceh) sebagai

bagian dari NII (Negara Islam Indonesia)<sup>96</sup>. Sebenarnya hal ini telah lama disiapkan sejak awal pemberontakan, tetapi bukanlah menjadi sasaran utama perjuangan, yang didahulukan adalah aspek fisik dan mental dari pasukan.<sup>97</sup>

Para peserta sepakat untuk mengangkat Kepala Negara yang sekaligus menjadi wali Negara, rakyat Aceh yaitu Teungku Muhammad Daud Beureueh. Konsep kenegaraan diubah total, yaitu dari Negara bagian NII menjadi Negara Bagian Aceh dari sebuah konfederasi NII yang dipimpin Kartosuwiryo di Jawa Barat.<sup>98</sup> Kesepakatan mereka menggunakan sistem yang memisah secara tegas antara Pemerintah Sipil dengan kekuasaan militer, kemudian membentuk kabinet Negara Bagian Aceh, yang bertugas untuk membantu pekerjaan wali negara<sup>99</sup>. Hasil utama kaum pemberontak adalah penyelundupan dan perdagangan legal serta tidak legal lainnya yang mereka lakukan dengan Penang dan Singapura yaitu berupa komoditas ekspor yaitu biji kopi, karet, minyak nilam, tembaga dan kuningan, secara politis kegiatan dagang ini digabungkan dengan usaha penyelundupan perlengkapan militer ke Aceh dan juga merupakan saluran komunikasi dengan pemimpin-pemimpin pemberontakan lainnya

### C. Menuju Penyelesaian

Penyerangan dari pihak pemberontak sering kali dilakukan yang cukup menjatuhkan semangat lawan, walaupun tidak semuanya menghasilkan barang rampasan dan tentu saja akhirnya yang menjadi korban adalah penduduk

---

<sup>96</sup> *Ibid*, hlm 273

<sup>97</sup> Nazarudin Syamsudin, *op. cit.*, hlm 204

<sup>98</sup> Sanusi Pane, *op. cit.*, hlm 17

<sup>99</sup> *Ibid*, hlm 18

kampung. Operasi Hunain yang dilakukan pihak pemberontak cukup merepotkan komandan TNI Syamaun Gaharu, padahal operasi Hunain ini dirancang untuk menjawab serangan gencar yang dilakukannya terhadap Aceh yaitu di Aceh Besar dan Pidie yang banyak menelan korban. Operasi Hunian inilah yang merupakan faktor utama yang menyebabkan Syamaun Gaharu beralih sikap dari mencoba menghancurkan secara kekerasan ke sikap mengusahakan perdamaian, melalui suatu konsepsi yang disebut “Konsepsi Prinsipil Bijaksana”<sup>100</sup>. Konsepsi Prinsipil Bijaksana yang diumumkan pada Februari tahun 1957 oleh Syamaun Gaharu yang merupakan suatu rumusan untuk mengakhiri pemberontakan secara damai yang artinya bahwa dengan bijaksana Gaharu menawarkan kesempatan kepada pemberontak Darul Islam untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, seraya tetap mempertahankan prinsip pemerintah untuk menggunakan kekuatan di mana perlu.<sup>101</sup>

Bertolak dari adanya Konsepsi Prinsipil Bijaksana ini maka sering diadakan kontak-kontak antara pihak pemberontak dan Syamaun Gaharu yang merupakan Pemimpin KDMA (Komando Daerah Militer Aceh). Usaha menjalin kontak dengan pemimpin pemberontakan akhirnya membuahkan suatu kesepakatan, yang kemudian dikenal dengan sebutan “Ikrar Lam Teh”<sup>102</sup> pada tanggal 8 April 1957. Dasar Ikrar ini tercapai pula suatu persetujuan antara kedua belah pihak, yaitu antara pihak pemberontak yang dipimpin oleh Teungku

---

<sup>100</sup> Hasan Saleh, *op. cit.*, hlm 306

<sup>101</sup> Nazarudin Syamsudin, *op. cit.*, hlm 247

<sup>102</sup> Tantangan Dan Rongrongan, *op. cit.*, hlm 111

Muhammad Daud Beureueh dengan pihak KDMA pimpinan Syamaun Gaharu untuk menghentikan tembak menembak atau melakukan genjatan senjata<sup>103</sup>.

Suatu keadaan di mana kedua belah pihak saling menghentikan serangan dan tindakan apapun yang dapat menyulut kembali peperangan, para pemimpin dapat saling bertemu dan membicarakan ataupun melakukan suatu tindakan positif untuk mengatasi peperangan. Pada masa ini Syamaun Gaharu yang merupakan perwakilan dari KDMA melakukan pendekatan yaitu dengan membawa pulang sebanyak mungkin batalyon Aceh yang dulu sempat dimutasikan dan membentuk sebuah resimen Aceh yang terdiri atas prajurit-prajurit Aceh dan tidak lagi didominasi oleh Sumatra Utara. Satu hal yang lebih penting lagi bagi rakyat Aceh adalah fakta bahwa perdamaian dan pembangunan kembali Aceh yang benar-benar dilaksanakan secara nyata seperti pengintensifan kembali perdagangan barter yang sangat membantu sekali dalam pembangunan kembali perekonomian rakyat Aceh<sup>104</sup>.

Menjadi jelas dalam hal ini adalah bahwa Syamaun Gaharu memang berniat untuk menyelesaikan keadaan ini secara damai, dan dengan berbagai usahanya ini secara tidak langsung rakyat menjadi tersentuh dan luluh dengan apa yang telah diusahakannya untuk membangun kembali Aceh. Tetapi apa yang dilakukan oleh Syamaun Gaharu ini adalah berdasarkan kongres pada masa genjatan senjata yang dihadiri oleh kurang lebih 600 peserta dari seluruh Indonesia yaitu yang akan dengan segera membentuk propinsi Aceh seperti apa yang diidam-idamkan rakyat Aceh sejak awal.

<sup>103</sup> M. Nur El Ibrahimy, *op. cit.*, hlm 164

<sup>104</sup> Nazarudin Syamsudin, *op. cit.*, hlm 280

Dengan adanya situasi yang demikian Teungku Daud Beureueh khususnya sadar bahwa ia tidak boleh melawan arus pikiran rakyat, jika tidak maka ia akan bertentangan dengan rakyat sendiri yang sudah sangat tersentuh dan bahagia sekali atas rencana perdamaian yang ditawarkan oleh Syamaun Gaharu dan Gubernur Hasjymy. Walaupun tanggapan rakyat antusias atas rencana ini dan hal ini jugalah yang mendorong pemimpin pemberontak menyetujui rencana, tetapi tetap muncul berbagai tantangan antara lain dari unsur Perti dan *Uleebalang*. Kelompok Perti dan *Uleebalang* merasa diabaikan dan kecewa atas perlakuan Pemerintah Pusat yang memanjakan pemberontak<sup>105</sup>. Tentu saja kritik ini menaikkan suhu politik Aceh pada waktu itu, bukan itu saja Kaum *Uleebalang* masih berusaha menggagalkan Konsepsi Prinsipil Bijaksana dengan mendirikan NURI (Nasional *Uleebalang* Republik Indonesia) tetapi rencana ini cepat dipukul mundur pada bulan Agustus 1957 oleh Syamaun Gaharu dengan menahkai pimpinannya yaitu Tuanku Husin.

Tantangan lain yang terbesar datang dari PRRI yang dengan segera mengajak Teungku Daud Beureueh untuk bergabung melawan Pemerintah Pusat, tetapi rencana penyerangan inipun juga dengan mudah dapat digagalkan karena dua alasan, pertama pemusatan kekuatan TII di sekitar Kutaraja telah dihambat oleh berbagai kesulitan logistik, yang agaknya diakibatkan oleh korupsi. Kedua, Syamaun Gaharu berhasil menyingkapkan rencana itu dan melancarkan gerakan perlawanan dengan menangkap Mayor Manyak pada tanggal 26 April 1958

---

<sup>105</sup> *Ibid*, hlm 280

yang merupakan pemimpin gerakan tersebut<sup>106</sup>. Dimulainya pembangunan Aceh dalam berbagai bidang dan banyaknya tantangan yang dihadapi menghidupkan kembali harapan rakyat Aceh akan kehidupan yang mereka idam-idamkan, dari sini tentu saja para pemimpin baru dianggap sebagai pahlawan sejati dan penyelamat rakyat Aceh. Tindakan-tindakan dari kelompok Syamaun Gaharu dan Gubernur Hasjmy menyurutkan popularitas pemimpin pemberontakan Aceh sebelumnya.

Walaupun telah diketahui sejak awal bahwa Teungku Daud Beureueh di samping masih terikat dengan status gajatan senjata dengan KDMA Teungku juga bekerjasama dengan PRRI, bahkan berusaha untuk melawan Pemerintah Pusat. KDMA pimpinan Syamaun Gaharu tidak berkeinginan untuk menghukum kelompok ini, ataupun menangkap mereka, bahkan gajatan senjata tetap dipertahankan. Dalam suasana gajatan senjata ini muncul suatu perdebatan besar di Aceh mengenai syarat-syarat yang diajukan kepada Pemerintah Pusat dalam rangka untuk mengakhiri perjuangan. Di sinilah perpecahan antara Ulama dan Zuama terlihat sekali, walaupun sebenarnya pada awalnya juga telah terlihat tetapi tidak terlalu mencolok.

Ulama yang dipimpin oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh beserta para ulama lainnya menolak penyelesaian yang didasarkan atas Konsepsi Prinsipil Bijaksana Syamaun Gaharu yang hanya menawarkan amnesti dan rencana rehabilitasi yang terbatas. Mereka menuntut selain keistimewaan dalam bidang agama dan otonomi yang luas bagi Aceh sebagai prasyarat penyelesaian

---

<sup>106</sup> *Ibid*, hlm 285

pemberontakan, juga menuntut pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh dan juga pengakuan Aceh sebagai Negara Bagian dari Republik Indonesia. Di sisi lain Hasan Saleh kelompok Zuama menyarankan kepada para ulama yang dipimpin oleh Daud Beureueh agar membuang tuntutan yang mustahil dikabulkan dan agar mereka bersikap lebih realistis, tapi mereka tetap berpegang teguh dengan prinsip mereka.<sup>107</sup>

Pada akhir tahun 1858 kelompok Zuama merasa perbedaan pandangan dengan Ulama akan sangat sulit dijabatani, maka ia meminta Nasution datang ke Aceh untuk membicarakan masalah ini secara langsung, pertemuan ini berhasil memunculkan kesepakatan bahwa memperoleh status istimewa jika mereka mengakhiri pemberontakan, tetapi adanya pembicaraan ini membuat panas Teungku Daud Beureueh, sebab pertemuan itu dilakukan tanpa sepengetahuannya. Kemudian Teungku Daud Beueueh meminta Hasan Saleh dan Ayah Gani untuk menghadap tapi perintah itu tidak dipatuhinya, hingga hal ini membuat marah Teungku Daud Beureueh.

Pada permulaan tahun 1959 mulai terlihat gejala-gejala perpecahan di kalangan pemberontak atau lebih jelasnya antara Teungku Daud Beureueh, Hasan Ali, Ilyas Iubee di satu pihak dengan trio Hasan Saleh, Ayah Gani dan Husin Almujaahid di pihak lain. Kemelut ini mencapai puncaknya tanggal 15 Maret 1959 jam 10.00 WIB kolonel Hasan Saleh sebagai menteri urusan perang, telah mengambil alih pimpinan NBA sipil dan militer dari tangan wali Negara

---

<sup>107</sup> *Ibid*, hlm 289-290

Teungku Daud Beureueh<sup>108</sup>, yang digantikan oleh Amir Husin Almujaheed<sup>109</sup>. Bersamaan dengan itu dibangun Dewan Revolusi yang dipimpin oleh Ayah Gani yang akan dengan segera mengirimkan delegasi ke Jakarta untuk membicarakan berakhirnya pemberontakan dengan para penguasa Republik<sup>110</sup>. Adanya Dewan Revolusi inilah yang nantinya akan membawa rakyat Aceh ke suatu tempat yang mulia dan bahagia. Dalam suatu pernyataan Wali Negara NBA/TII

“ Bermusyawarah ialah memperbincangkan semua soal melalui diplomasi, dan sekali kali tidak dapat diartikan dengan menyerah, dengan musyawarah bukan maksud mencari menang, tetapi di atas hasil musyawarah kelak kita menerima sebagian dan pihak Pemerintah Republik Indonesia menerima sebagian dari cita-cita kedua belah pihak ..”

Dengan pernyataan ini jelas hendak dibawa ke mana Dewan Revolusi<sup>111</sup>

Dalam perundingan selanjutnya Pemerintah Pusat mengirimkan sebuah misi ke Aceh untuk berunding dengan dewan Revolusi yang dipimpin oleh Perdana Menteri Harjo. Akhirnya dicapai suatu keputusan pembentukan propinsi daerah istimewa Aceh yang ditetapkan dengan perundingan tentang status militer yaitu masuknya resimen Teungku Chik Di Tiro beserta keenam batalionnya ke dalam KDMA, sesuai dengan keputusan para perwira TII di Indrapuri<sup>112</sup>.

Musyawarah yang berjalan lancar ini membuahkan butir-butir hasil pemikiran yang gemilang seperti berikut :

- a) Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia tanggal 26 Mei 1959 No.I / Misi / 1959 yang pokoknya menyatakan bahwa Daerah Swatantra Tingkat I Aceh dapat disebut “ Daerah Istimewa Aceh “ dengan catatan bahwa kepada daerah itu tetap berlaku ketentuan-ketentuan mengenai daeran Swatantra Tingkat I seperti termuat dalam

<sup>108</sup> M.Nur El Ibrahimy, *op. cit.*, hlm 270.

<sup>109</sup> *Ibid*, hlm 165

<sup>110</sup> Cornelis Van Dijk, *op. cit.*, hlm 316

<sup>111</sup> M. Nur El Ibrahimy, *op. cit.*, hlm 116

<sup>112</sup> Hasan Saleh, *op. cit.*, hlm 365



Undang-Undang NO. I tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan Daerah begitu pula lain-lain peraturan perundangan yang berlaku untuk Daerah Swatantra Tingkat I mengenai otonomi yang seluas-luasnya terutama dalam keagamaan, peradilan, dan pendidikan.

- b) Segala aparat dari NBA/ NII (militer/ Polisi/ Sipil ) diterima ke dalam pasukan yang bernama pasukan Tengku Tjihik di Tiro sebagai bagian dari komando daerah Militer Aceh/ Iskandar Muda sesuai dengan pernyataan Misi Pemerintah Pusat yang bertanggal Kutaraja, 26 Mei 1959.
- c) Pemerintah akan membantu sekuat tenaga dalam batas-batas kemampuan Negara pembangunan semesta di Aceh, terutama dalam bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan rakyat, jasmani, rohani; untuk langkah pertama untuk merealisasi maksud Pemerintah tersebut Misi Pemerintah Pusat telah membawa otorisasi sejumlah 88,4 juta rupiah.<sup>113</sup>

Dengan persetujuan di atas maka leburlah NBA dari Negara Islam Indonesia di bawah pimpinan para Zuarra, baik secara sipil maupun militer yang menjadi sebuah pasukan Teungku Tjihik Di Tiro yang tergabung dalam TNI. Persetujuan Mei secara resmi diterima para pendukung Dewan Revolusi pada suatu konferensi besar yang diadakan dalam minggu pertama November<sup>114</sup>. Terjadi suatu proses konsolidasi dan perjuangan memperluas pengaruh di dalam dan luar negeri masing-masing, dalam usahanya untuk mengalahkan saingan mereka.

Kedua belah pihak terpaksa bersandar pada kekuatan luar, karena kurangnya dukungan rakyat, Dewan Revolusi harus menyandarkan diri pada popularitas kepemimpinan formal Syamaun Gaharu dan Hasjmy. Sedangkan pihak Ulama terdorong untuk bekerjasama lebih dekat lagi dengan PRRI. Dengan bantuan PRRI pada awal Mei 1959 NBA berhasil mengkonsolidasikan

<sup>113</sup> M. Nur El Ibrahimy, *op. cit.*, hlm 168-169

<sup>114</sup> Cornelis Van Dijk, *op. cit.*, hlm 317

diri dan siap bergerak untuk menghancurkan Dewan Revolusi<sup>115</sup>. Hasil kerjasama ini adalah terbentuknya Republik Persatuan Islam ( RPI ) pada tanggal 8 Februari 1960 dan salah satu Negara bagiannya disebut dengan Republik Islam Aceh ( RIA ) yang sekaligus pembubaran PRRI dan NBA . Sehingga tamatlah Konsepsi Prinsipil Bijaksana buatan Syamaun Gaharu.

Dalam perkembangan selanjutnya Pengganti Syamaun Gaharu sebagai Panglima KDMA adalah Kolonel Muhammad Yasin yaitu seorang Aceh yang tinggal di Jawa Timur. Muhammad Yasin memulai pendekatan dengan lunak yaitu dengan meneruskan pembangunan yang telah diusahakan oleh Syamaun Gaharu dan mengambil alih Konsepsi Prinsipil Bijaksana. Kendati operasi militer masih tetap dilaksanakan tetapi tetap dilakukan pendekatan pribadi kepada RIA, Muhammad Yasin menghimbau para pemberontak untuk kembali dengan suka rela agar suatu pemulihatan spiritual tercapai dengan menawarkan amnesti umum yang hanya berlaku sebelum tanggal 5 Oktober 1961.

Dengan mengunjungi hampir semua sudut Aceh selama bulan April sampai dengan Juni. Hanya sejumlah kecil anggota TII yang mau melaporkan diri sedangkan yang lainnya masih tetap setia kepada Daud Beureueh yang sangat teguh pendiriannya. Dalam usahanya mengadakan hubungan dengan Daud Beureueh, Muhammad Yasin menempuh jalan surat menyurat. Dengan bahasa yang halus Yasin memohon kepada Daud Beureueh agar bersedia kembali di tengah-tengah rakyat Aceh, dengan menawarkan untuk menunaikan

---

<sup>115</sup> Nazarudin Syamsudin, *op. cit.*, hlm 289-290

Ibadah Haji<sup>116</sup>. Surat Muhammad Yasin mendapatkan sambutan hangat, pada awal Agustus 1961 Daud Beureueh mengirimkan A.R Masjim untuk menghadap Muhammad Yasin. Pertemuan inilah yang menghasilkan penyelesaian masalah Aceh dengan cara musyawarah.

Sikap lunak yang diperlihatkan Daud Beureueh dalam menerima tawaran Muhammad Yasin untuk kembali di tengah-tengah masyarakat Aceh ini karena perjuangan TII ini telah kehilangan sebagian besar daya tarik penduduk atas perjuangan ini, karena seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa Pemerintah Pusat perlahan-lahan berusaha membangun kembali Aceh dalam bidang administrasi, militer dan keagamaan yang selama ini menjadi keinginan masyarakat Aceh. Di samping itu dukungan rakyat terhadap RIA beralih kepada Pemerintah Pusat karena beberapa hal yang pertama, propaganda pemerintah yang meningkatkan harapan terhadap “Masyarakat adil dan makmur“ telah merasuki Aceh, sedangkan RIA tidak mampu menandingi propaganda tersebut karena kurangnya dukungan finansial. Kedua, rakyat Aceh tersentuh dengan slogan-slogan pembangunan daerah yang berhasil meningkatkan harapan rakyat Aceh akan pembangunan kembali Aceh dalam berbagai bidang, dan juga secara langsung masyarakat dapat melihat pembangunan tersebut sedang berlangsung<sup>117</sup>

Beralihnya dukungan rakyat inilah yang merupakan penyebab pokok hancurnya gerakan-gerakan Pemberontak. Pada tingkat Nasional perubahan itu didorong oleh perubahan-perubahan politik yang terjadi setelah dikeluarkan

---

<sup>116</sup> Uraian-uraian tentang surat menyurat antara Daud Beureueh dengan Pemerintah Pusat dapat dilihat dalam buku M. Nur El Ibrahimy, *Teungku Daud Beureueh*, Jakarta, Gunung Agung, 1982, hlm 276

<sup>117</sup> Nazarudin Syamsudin, *op. cit.*, hlm 328

dekrit Presiden Soekarno yaitu kembalinya ke Undang-Undang Dasar 1945<sup>118</sup>. Bersamaan dengan pembentukan kembali provinsi Aceh, pembentukan komando militer dan pemberian status daerah istimewa serta pembangunan inilah yang luar biasa di bidang pendidikan. Sedangkan kalangan Darul Islam semakin terisolasi karena kegagalan mengatasi operasi-operasi militer pemerintah dengan memotong garis logistik mereka, kekuatan RIA juga semakin hancur karena pemerintah berusaha menempatkan sebanyak banyaknya tentara dan polisi di Aceh dari suku bangsa Aceh sendiri sehingga melawan Pemerintah Pusat sama saja melawan saudaranya sendiri. Operasi-operasi militer dilakukan untuk memaksa pemberontak meninggalkan perjuangan mereka.

Minimnya senjata yang dimiliki pasukan Daud Beureueh dan juga lemahnya kekuatan militer membuat mereka kesulitan menguasai daerah-daerah, dan dengan mudah serangan mereka dihalau oleh TNI. Tidak ada pilihan lain lagi bagi mereka selain daripada menghindari pertempuran, banyak pemberontak yang kembali ke kampung mereka ataupun memindahkan pos-pos mereka. Akibatnya komunikasi antar Pemimpin dan juga komandan-komandan regimennya praktis terputus setelah bulan April 1961. Perdamaian fisik yang ditawarkan oleh Muhammad Yasin ini selain belum diterima oleh Daud Beureueh dan pasukannya, juga mendapat tentangan yang berasal dari kelompok Perti dan *Uleebalang*, mereka menganggap apa yang dilakukan para pemberontak terhadap mereka tidak dapat dimaafkan dan sebagian dari mereka juga sedang menunggu kesempatan untuk berurusan dengan pemberontak

---

<sup>118</sup> *Ibid*, hlm 86

sehubungan dengan pembunuhan terhadap anggota keluarga mereka serta perampasan harta benda mereka pada tahun 1946<sup>119</sup>.

Tetapi rintangan cepat dihapus oleh Muhammad Yasin. Akhirnya Muhammad Yassin mengutus sebuah delegasi yang terdiri atas 28 tokoh untuk mengunjungi dan membujuk Teungku Daud Beureueh agar kembali dan memimpin rakyat Aceh. Maka disusunlah rencana realisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia, mengenai bidang-bidang yang akan dilakukan perubahan dalam kehidupan masyarakat Aceh<sup>120</sup>. Hasilnya, banyak pemimpin pemberontakan yang menyerahkan diri pada bulan Oktober, tetapi Daud Beureueh dan beberapa staf lainnya lebih suka tinggal di hutan. Pada tanggal 2 Oktober Muhammad Yassin mengunjungi Daud Beureueh dan berbicara dari hati ke hati, selanjutnya pada tanggal 7 April 1962 dengan dukungan penuh dari DPRD dan beberapa jendral di Jakarta, Muhammad Yasin menyatakan berlakunya Syaria Islam di Aceh.

Sebulan kemudian sebuah konvoi mobil dan bus membawa para pemimpin masyarakat dan pejabat pemerintah untuk menemui Daud Beureueh di Aceh Timur dan membawanya kembali ke Kutaraja. Daud Beureueh mengatakan “Atas permintaan rakyat saya kembali kepada rakyat...” ini berarti juga bahwa tidak ada lagi permusuhan di antara sesama kita, sesama bangsa yang telah berlangsung selama delapan tahun, sepuluh bulan dan 27 hari”<sup>121</sup>. Dengan

---

<sup>119</sup> Nazarudin Syamsudin, *op. cit.*, hlm 331

<sup>120</sup> Tantangan Dan Rongrongan, *op. cit.*, hlm 131

<sup>121</sup> Nazarudin Syamsudin, *op. cit.*, hlm 332

demikian penyelesaian spiritual telah tercapai dan Aceh pun kembali menjadi sebuah Propinsi Daerah Istimewa dengan otonomi yang seluas luasnya terutama dalam bidang pendidikan, adat dan agama.



## BAB IV

### AKIBAT PEMBERONTAKAN DI/TII ACEH BAGI ACEH

Pergolakan daerah-daerah yang pernah terjadi di Indonesia pada masa awal kemerdekaan dipicu oleh hubungan antara pusat dan daerah. Daerah-daerah tertentu yang kaya akan sumber-sumber alam sudah sejak lama tidak puas dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang dianggap tidak memperhatikan kepentingan daerah dan peningkatan kehidupan rakyat di daerah, padahal devisa yang diterima oleh pemerintah pusat sebagian besar berasal dari daerah-daerah kaya. Ketidakpuasan ini cenderung membangkitkan konflik fisik dengan menggunakan senjata. Kepentingan politik (dalam bentuk anti komunis) dan kepentingan primordial (dalam bentuk kepentingan daerah) berbaur menjadi satu yang menghasilkan solidaritas kelompok yang cukup kuat di daerah-daerah<sup>122</sup>. Dalam hal ini Aceh sebagai daerah yang mengalami keadaan serupa, di mana kekecewaan ini berbuntut pemberontakan yang pecah pada tahun 1953, yang dimotori oleh para Ulama PUSA.

Kegigihan rakyat Aceh dalam perjuangan kemerdekaan yang mereka anggap sebagai suatu tindakan *fi sabilillah* (Berjuang di jalan Allah), perjuangan yang tanpa mengenal pamrih, hanya saja rakyat Aceh menginginkan diberlakukannya Syari'at Islam. Segala cara dilakukan untuk membantu perjuangan Pemerintah Pusat melawan Belanda. Tetapi apa jadinya setelah perjuangan bersenjata selesai? bukan saja tuntutan pemberlakuan Syari'at Islam

---

<sup>122</sup> Maswadi Rauf, *Konsensus Dan Konflik Politik*, Jakarta, Depdiknas, 2001, hlm 59

dipenuhi, bahkan otonomi Aceh dihapuskan. Kisah inilah yang merupakan pembelaan terhadap langkah politik radikal yang telah diambil oleh rakyat Aceh yang telah memunculkan peristiwa berdarah pada tahun 1953. Dengan timbulnya peristiwa ini tentu saja Aceh “terlambat” dalam memasuki dunia modern.

Patriotisme memang ternyata harus dibayar dengan keterbelakangan, sehingga dalam konstelasi politik dan administrasi modern Aceh belum mendapat tempat<sup>123</sup>. Sebenarnya yang menjadi awal permasalahan adalah bahwa yang menjadikan rakyat Aceh mengambil sikap radikal ini hanyalah suatu keinginan dari mereka untuk perubahan status Provinsi Aceh menjadi daerah istimewa, yang keistimewaaannya dalam hal pemberian hak-hak otonomi yang luas dalam bidang agama, pendidikan dan adat. Tetapi perwujudan keinginan ini ternyata membutuhkan perjuangan yang panjang, yang memaksa mereka untuk mengambil sikap radikal yaitu memberontak kepada Pemerintah Pusat. Perjuangan ini dilakukan secara bertahap, dimulai dengan cara berjuang untuk diakuiinya Aceh sebagai daerah istimewa dan masih mencoba untuk mengkonsolidasikan kedudukan Aceh sebagai suatu provinsi, kemudian menjadikan status Daerah Aceh ini sebagai titik tolak untuk merumuskan makna yang sesungguhnya dari sebutan sebagai serambi Mekkah, tempat melaksanakan hukum Islam<sup>124</sup>.

Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia di Aceh dianggap berakhir setelah pimpinan dan para pengikutnya turun dari gunung, kembali dan diterima dalam masyarakat. Tetapi jika kita lihat kembali bahwa sejak tanggal 26

<sup>123</sup> Taufik Abdullah, *Islam Dan Masyarakat*, Jakarta, LP3ES, 1987, hlm 182-184

<sup>124</sup> B. J Boland, *Pergumulan Islam Di Indonesia*, Jakarta, Grafiti, 1985, hlm 183



Mei 1959 Darul Islam dengan Tentara Islam Indonesia telah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, hanya saja Daud Beureueh dan pengikutnya yang setia dalam kubu Ulama belum menyetujui untuk menghentikan pemberontakan. Sebagai hasil kompromi antara Aceh dan Pemerintah Pusat “ Jakarta” pada tanggal 26 Mei 1959, Provinsi Aceh diakui sebagai suatu daerah administrasi pemerintah yang bersifat istimewa. Keputusan ini diambil untuk memperoleh jaminan yang lebih besar lagi bagi kemajuan keamanan dan pembangunan di daerah Aceh dan sebagai dorongan untuk terwujudnya otonomi Aceh yang seluas-luasnya. Secara khusus otonomi ini akan diwujudkan dalam bidang agama, adat dan pendidikan. Pada tanggal 17 Agustus 1961 pemulihan keamanan di seluruh daerah Aceh diumumkan dengan khidmat, dan Aceh telah dikembalikan dari Darul Harb (wilayah Perang) kepada Darussalam (wilayah damai)<sup>125</sup>.

Setelah mengalami berbagai kekecewaan yang akhirnya memaksa mereka untuk memberontak dengan label Darul Islam, ternyata keterpurukannya itu tidak sia-sia, segala tuntutan kepada Pemerintah Pusat Jakarta yaitu agar diangkat sebagai daerah istimewa dengan otonomi yang seluas luasnya segera dipenuhi pada tahun 1959. Menjadi pertanyaan mengapa tidak sejak dulu sebelum pemberontakan itu pecah, Pemerintah Pusat segera meluluskan tuntutan tersebut? Tatanan politik yang tidak menentu pada waktu itu yang merupakan akibat dari berlakunya sistem kepartaian dapat dijadikan suatu alasan, dalam keadaan yang seperti ini berbagai problem sosial dan ekonomi yang muncul

---

<sup>125</sup> *Ibid*, , hlm 183

nyaris tidak bisa diatasi<sup>126</sup>. Sistem sentralisme yang diterapkan pemerintah menimbulkan reaksi rakyat yang menuntut pemberlakuan otonomi yang mencakup pengaturan wewenang pemerintahan agar pihak daerah dibenarkan mengatur rumah tangganya sendiri. Selain masalah administrasi pemerintahan, dalam istilah otonomi termasuk pula masalah pengaturan keuangan. Sedangkan untuk masalah yang menyangkut kepentingan nasional menjadi bagian Pemerintah Pusat<sup>127</sup>.

Desentralisasi dan otonomi di Indonesia memang perlu diterapkan, tetapi harus dalam batas yang memungkinkan. Bupati kepala daerah masih mempunyai wibawa Pemerintah Pusat yang cukup untuk mengumpulkan dan menyimpulkan pendapat rakyat di daerahnya untuk dijadikan dasar kebijaksanaan Pemerintah Daerah, tetapi wibawa itu tidak boleh demikian besarnya sehingga membunuh inisiatif rakyat<sup>128</sup>. Berdasarkan Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No.I/Missi/1959<sup>129</sup>, pembangunan Aceh mulai diluncurkan. Kebijakan pembangunan bidang pendidikan di Aceh pasca Darul Islam dimulai dengan rapat pada 1 Februari 1958, prioritas pertama adalah pembangunan “kota Pelajar-mahasiswa” sebagai pusat lembaga pendidikan tinggi. Pada 26 Maret 1958 dibentuk Anggaran Dasar Yayasan Dana Kesejahteraan Aceh yang merupakan bentuk kesadaran para pemimpin Aceh

---

<sup>126</sup> Depdikbud, *Kongres Nasional Sejarah Sub Tema Studi Komparatif Dan Dinamika Regional*, Jakarta., Putra Sejati Raya, 1997, hlm 263

<sup>127</sup> R.Z Leirissa, *PRRI PERMESTA*, Jakarta, Grafiti, 1991, hlm 7

<sup>128</sup> P.J. Suwarno, *Peranan Bupati Dalam Pelaksanaan*, Yogyakarta, Atma Jaya, 1986, hlm 94

<sup>129</sup> Hasan Saleh, *op. cit.*, hlm 406

melihat kehancuran masyarakat Aceh akibat pemberontakan dan berusaha untuk memajukan kembali masyarakat Aceh<sup>130</sup>.

Seorang Bupati Aceh mengatakan bahwa yang menjadi masalah pokok dalam hal ini adalah sikap dan pemikiran keacehan yang membuat masyarakat Aceh ketinggalan jaman dan pemecahan yang sedang ia usahakan sekarang adalah melalui pendidikan. Hanya lewat pendidikan, bukan politik katanya “ketinggalan Aceh” bisa dikejar. Ternyata usaha ini berhasil dengan baik dua lembaga pendidikan tinggi berhasil dibangun yaitu Universitas Syi’ah Kuala dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jami’ah Ar-Raniry<sup>131</sup>.

Pembangunan gedung sekolah maupun Masjid yang dibangun di Aceh bukan hanya untuk keperluan pendidikan dan keagamaan saja, keduanya dapat dijadikan sebagai lambang ke-enderungan social dan pemikiran yang sedang berkembang di Aceh, perubahan-perubahan struktural yang terjadi baik yang diperkenalkan dari luar maupun yang bertolak dari dinamika masyarakat sendiri, telah menjadikan bertambah kompleksnya “Peta Bumi” Aceh<sup>132</sup>. Dari sinilah dasar-dasar informasi yang nanti akan menyebar ke masyarakat dimulai, pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru di sekolah dapat mendidik calon-calon pemuda yang akan segera ikut membangun Aceh dan pengalaman-pengalaman dari para ulama pemimpin masjid yang disebarkan melalui da’wah-da’wah yang dilakukan di Masjid-masjid.

Kepercayaan dari pemerintah untuk memberi kesempatan kepada golongan terpelajar untuk ikut menentukan arah bagi perkembangan sosial

<sup>130</sup> Tantangan Dan Rongrongan, *op. cit.*, hlm 92

<sup>131</sup> Taufik Abdullah, *op. cit.*, hlm 198

<sup>132</sup> *Ibid*, hlm 198

selanjutnya, menjadi suatu keinginan bagi para pemuda yaitu bagaimana Pemerintah Pusat membangun sekolah tinggi atau universitas yang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat pada waktu itu, misalnya pada waktu itu dibangun penyulingan minyak LNG di PT. Arun untuk itu hendaknya pemerintah membangun politeknik yang sesuai agar para putra daerah dapat menjadi bagian dalam perusahaan tersebut. Pendek kata pemerintah akan berusaha, supaya dalam waktu yang tidak terlampaui lama, ketinggalan Aceh di lapangan pengajaran berhubung dengan pengetahuan duniawi jika dibanding dengan daerah lain dapat segera disusul<sup>133</sup>.

Sejak tanggal 26 Mei 1959 telah diberikan kepada daerah Aceh otonomi dalam agama (Islam), adat dan pendidikan. Para pejabat Aceh telah terbukti bersikap toleran terhadap penganut agama-agama lainnya, sepanjang mereka tidak bersikap demonstratif provokatif atau agresif. Selain itu berdasarkan hasrat para pemimpin umat Islam untuk mengharuskan dipatuhinya beberapa unsur Hukum Islam tertentu oleh kaum muslimin di daerah Aceh, dan hal ini diikuti oleh DPRD Aceh yang segera membuat sebuah ketetapan “akan melaksanakan unsur-unsur Syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya “<sup>134</sup>. Jadi dalam segala bidang kehidupan di Aceh adalah berdasarkan hukum Islam yang telah meeka sepakati bersama.

Pembangunan dalam bidang pemerintahan telah mulai terlihat dengan didirikannya sebuah Majelis Ulama yang bertugas memberikan nasihat tentang masalah-masalah keagamaan kepada Pemerintah Daerah, baik atas permintaan

---

<sup>133</sup> Keterangan Dan Jawaban pemerintah, *op. cit.*, hlm 43

<sup>134</sup> B. J. Boland, *op. cit.*, hlm 185-186

para pejabat maupun atas prakarsanya sendiri. Selain itu banyak berdiri masjid masjid dan pesantren pesantren yang luas dan megah yang kemudian akan menghasilkan Ulama-ulama yang akan membantu membangun daerah Aceh. Seperti apa yang telah diungkapkan oleh Seorang Purnawirawan Perwira Aceh bahwa secara tradisional Aceh telah mempunyai kelengkapan alat pemerintahannya sendiri dan telah mengorganik dalam kehidupan sosial, dan juga relatif terbelakang dalam memasuki dunia modern akibat perang yang berlarut-larut. Lebih penting lagi kerangka kultural Aceh tak bisa lain dari pada Islam<sup>135</sup>.

Mengenai perkembangan daerah Aceh selanjutnya, hanya waktu yang menunjukkan apa dan berapa lamalah Aceh akan menjadi daerah tertutup, yang di dalamnya agama merupakan suatu unsur utama yang mempersatukan dan mengendalikan masyarakat<sup>136</sup>. Akan terjadi sejumlah perubahan-perubahan besar dalam masyarakat Aceh ke arah modernisasi yang tidak dapat dihambat, hal ini sesuai dengan perubahan yang terjadi di sekelilingnya. Dan pada waktunya nanti Aceh akan menjadi jalur lalu lintas dunia dan akan menjadi bagian dari dunia modern tanpa meninggalkan kehidupan agamawi.

---

<sup>135</sup> Taufik Abdullah, *op. cit.*, hlm 188

<sup>136</sup> B. J. Boland, *op. cit.*, hlm 193

## BAB V

### KESIMPULAN

Keadaan pada masa awal kemerdekaan yang belum stabil, memunculkan banyak kekecewaan masyarakat di daerah-daerah, dalam hal ini Aceh sebagai daerah yang merasa dianaktirikan setelah apa yang mereka berikan kepada Pemerintah Pusat. Berbagai kekecewaan yang bersifat keagamaan dan kedaerahan terhadap keadaan Aceh pada akhir masa revolusi merupakan dua penyebab utama pemberontakan Aceh. Konflik yang terjadi antara Ulama dan *Uleebalang* bukanlah menjadi salah satu faktor penting, pemberontakan ini pada dasarnya merupakan konflik antara pemimpin-pemimpin PUSA dengan Pemerintah Pusat. Penggabungan kembali Aceh menjadi bagian dari Propinsi Sumatra Utara, menjadi faktor dominan yang membuat masyarakat Aceh semakin merasa diasingkan oleh Pemerintah Pusat. Dari bertumpuknya kekecewaan masyarakat Aceh terhadap Pemerintah Pusat inilah yang menggerakkan rakyat Aceh yang tergabung dalam PUSA melakukan pemberontakan pada tanggal 21 September 1953.

Persiapan fisik dan mental yang sudah cukup matang, menjadi lemah ketika mengingat ketidakberuntungan Aceh pada awal gerakan, yaitu adanya penangkapan besar-besaran dari Pemerintah Pusat serta adanya pelucutan senjata. Tetapi hal ini tidak menjadi halangan bagi rakyat Aceh untuk melanjutkan usahanya. Dalam kepemimpinan Daud Beureueh muncul konflik strategi yang terjadi antara Daud Beureueh dan panglimanya yaitu Hasan Saleh.

Dari sinilah kemudian terjadi perpecahan yaitu Ulama yang dipimpin Daud Beureueh dan kelompok Zuama oleh Hasan Saleh. Pemberontakan ini berakhir damai, melalui KDMA (Komando Daerah Militer Aceh) pimpinan Syamaun Gaharu yang merupakan wakil Pemerintah Pusat dengan dicetuskannya “ Ikrar Lam Teh” .

Akibat dari pemberontakan ini adalah Aceh menjadi daerah Istimewa yang otonom dalam bidang agama, pendidikan dan adat walaupun kemudian masih ada perlawanan-perlawanan kecil dari beberapa personil dari Darul Islam yang tidak menginginkan perdamaian. Pembangunan kembali Aceh dalam berbagai bidang berusaha mensejajarkan masyarakat Aceh dengan daerah-daerah lain disekitarnya. Hanya dengan pendidikanlah masyarakat bisa lebih maju dan benar-benar menjadi bangsa yang mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajip Rosidi. (1986). *Sjafruddin Prawiranegara, Lebih Takut kepada Allah S.W.T.*, Jakarta, Inti idayu Press
- Amin.SM. (1978) *Kenang-Kenangan dari masa lampau*, pradnya paramita, Jakarta
- Audrey Kahin. (1989) *Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan*, Jakarta, Grafiti
- Boland, BJ. (1985). *Pergumulan Islam Di Indonesia*. Jakarta. Grafiti
- Depdikbud. (1997). *Kongres Nasional Sejarah Sub Tema Studi Komparatif Dan Dinamika Regional*. Jakarta. Putra Sejahtera Raya
- \_\_\_\_\_. (1994). *Tantangan Dan Pendorong Terhadap Keutuhan Dan Kesatuan Bangsa; Kasus Darul Islam Di Aceh*. Jakarta. Depdikbud
- \_\_\_\_\_. (1978). *Sejarah Daerah Propinsi Daerah istimewa Aceh*, Yogyakarta. Depdikbud
- \_\_\_\_\_. (1983). *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Istimewa Aceh* Jakarta. Depdikbud
- Dijk, C. van (1983). *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*. Jakarta. Grafiti
- Geertz, H. (1985). *Mengerti Sejarah*. Jakarta. U I Press
- Hasan Saleh. (1992). *Mengapa Aceh Bergolak*. Jakarta. Grafiti
- Hasan Shadily. (1994). *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta. Bina Aksara
- Hasbi Amiruddin. (2004). *Perjuangan Ulama Aceh di Tengah Konflik*. Yogyakarta. CENINNETS Press
- Husain, Abdullah. (1990). *Peristiwa Kemerdekaan Di Aceh*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Ibrahim Alfian dkk. (1982). *Revolusi kemerdekaan Indonesia Di Aceh (1945-1949)*. Aceh. Depdikbud



- Institut Studi Arus Informasi. (1998). *DOM di Aceh*. Jakarta. Institut Studi Arus Informasi
- Ismail Sunny.(1980). *Bunga Rampai Tentang Aceh*. Jakarta. Bharata Karya Aksara
- Jason, Karl. (1989). *Kewibawaan Tradisional, Islam Dan Pemberontakan*. Jakarta. Grafiti
- Kementrian Penerangan RI. (1953). *Keterangan Dan Jawaban Pemerintah Tentang Peristiwa Daud Beureueh*. Jakarta: Kementrian Penerangan RI
- Kuntowijoyo. (1995). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta. Bentang Budaya
- Leirissa, R.Z. (1991). *PRRI PERMESTA*. Jakarta. Grafiti
- Mulyono, Anton . (1990). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka
- Nazaruddin Syamsuddin. (1990). *Pemberontakan Kaum Republik Kasus Darul Islam*. Jakarta. Grafiti
- \_\_\_\_\_. (1989). *Integrasi Politik Di Indonesia*. Jakarta. Gramedia
- Nazir, Muhammad. (1997). *Metode Penelitian*. Jakarta. Ghalia Indonesia
- Nur El Ibrahimy M. (1982). *Tengku Muhammad Daud Beureueh*. Jakarta. Gunung Agung
- Rani Usman, A. (2003). *Sejarah Peradaban Aceh*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia
- Roid, Anthony. (1987). *Perjuangan Rakyat*. Jakarta. Oxford University Press
- Poeslan Abdulgani. (1968). *Penggunaan Ilmu Sejarah*. Jakarta. Prapanca
- Sanusi Pane. (2001). *Sejarah Dan kekuatan gerakan Aceh Merdeka*. Jakarta. Grasindo
- Sartono Kartodirjo. (1989). *Pemikiran Dan Perkembangan Historiografi Indonesia Suatu Alternatif*. Jakarta. Gramedia.
- Suwarno, P.J. (1986). *Peranan Bupati Dalam Pelaksanaan*, Yogyakarta. Atma Jaya
- Taufik Abdullah. (1987) . *Islam Dan Masyarakat*. Jakarta. LP3ES

NN. (1991). *Ensiklopedi Nasional Indonesia Jild 16*. Jakarta. PT. Cipta Adi Pustaka



# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## SILABUS BERBASIS KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

Mata Pelajaran : Sejarah  
 Satuan pendidikan : SMA  
 Kelas, Semester : XI / 2  
 Tahun pelajaran : 2006 / 2007  
 Standar Kompetensi : Menganalisis perkembangan bangsa Indonesia sejak masuknya pengaruh Barat sampai dengan pendudukan Jepang.

Kompetensi Dasar	Indikator	Materi	Pengalaman Belajar	Penilaian			Waktu	Sumber bahan
				Jenis tagihan	Bentuk tagihan	Contoh tagihan		
Memahami peristiwa Pemberontakan DI/TII Aceh 1953-1959	a) Mendiskripsikan dan menganalisis sebab-sebab yang melatarbelakangi munculnya pemberontakan DI/TII Aceh 1953-1959?	1. Latar belakang pecahnya Pemberontakan DI/TII Aceh 1953-1959 a. Pembubaran Propinsi Aceh b. Konflik Ulama dan Uleebalang c. Sikap acuh tak acuh Pemerintah Pusat terhadap tuntutan rakyat Aceh	Siswa dapat mendeskripsikan latar belakang Pemberontakan DI/TII Aceh 1953-1959	Tugas	Uraian	1. Deskripsikan Latar belakang pecahnya Pemberontakan DII/TII Aceh 1953-1959?	2x 45 menit	Dijk, C. Van . (1983). <i>Darul Islam Sebuah Pemberontakan</i> . Jakarta. Grafiti  Hasan Saleh. (1992). <i>Mengapa Aceh Bergolak</i> . Jakarta. Grafiti  M. Nur El Ibrahimy. (1982). <i>Tengku Muhammad Daud</i>
	b) Menjelaskan dan menganalisis bagaimana berlangsungnya pemberontakan DI/TII Aceh 1953-1959	2. Berlangsungnya Pemberontakan DI/TII Aceh 1953-1959 a. Persiapan pemberontakan b. Strategi pemberontakan c. Menuju penyelesaian	Siswa dapat menjelaskan dan menganalisis dalam diskusi mengenai berlangsungnya Pemberontakan			2. Jelaskan bagaimana berlangsungnya Pemberontakan DI/TII Aceh 1953-1959?		

	<p>c) Menganalisis akibat-akibat apa saja yang ditimbulkan dari pemberontakan DI/TII Aceh 1953-1959</p> <p>Menemukan makna dari Pemberontakan DI/TII Aceh 1953-1959 sebagai salah satu bentuk protes dari masyarakat Aceh terhadap kebijakan Pemerintah</p>	<p>3. Akibat yang ditimbulkan Yaitu Aceh menjadi daerah istimewa yang otonom dalam bidang Agama adat dan pendidikan</p> <p>4. Menemukan makna dari Pemberontakan DI/TII Aceh 1953-1959 dengan perkembangan masyarakat Aceh dewasa ini</p>	<p>DI/TII Aceh, yaitu tentang persiapan, strategi dan penyelesaian</p> <p>Siswa dapat menganalisis dalam kelompok peranan H.O.S Tjokroaminoto dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial</p> <p>Menemukan contoh kebijakan pemerintah Pusat dalam menghadapi permasalahan-permasalahan di Indonesia khususnya di daerah Aceh saat ini</p>	<p>Uraian</p>	<p>3. Jelaskan dengan analisis akibat yang ditimbulkan dari Pemberontakan DI/TII Aceh 1953-1959?</p> <p>4. Berikan contoh kebijakan-kebijakan dari pemerintah dalam menghadapi permasalahan di Aceh saat ini ?</p>	<p><i>Beureueh.</i> Jakarta. Gunung Agung</p> <p>Sanusi Pane. (2001). <i>Sejarah Dan kekuatan gerakan Aceh Merdeka.</i> Jakarta. Grasindo</p> <p>Rani Usman, A. (2003). <i>Sejarah Peradaban Aceh.</i> Jakarta. Yayasan Obor Indonesia</p>
--	---	---	--	---------------	--	--

Mengetahui,  
Kepala Sekolah

Nama

Yogyakarta, 10 Februari 2007  
Guru Mata Pelajaran

Nis Ika Herwati